

BUKU II



MASTERPLAN SMART CITY KOTA PALOPO



PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku 2: Masterplan *Smart City* Kota Palopo merupakan dokumen inti Masterplan *Smart City* yang digunakan sebagai acuan pembangunan pencapaian tujuan *Smart City* Kota Palopo. Masterplan *Smart City* Kota Palopo disusun berdasarkan analisis arah pembangunan, strategi pembangunan *Smart City*, Rencana Aksi, dan Peta Jalan (*Roadmap*) *Smart City* Kota Palopo. Arah pembangunan *Smart City* Kota Palopo disusun berdasarkan hasil analisis visi, misi, sasaran, dan indikator utama *Smart City* Kota Palopo. Analisis strategis dan arah pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil identifikasi strategi yang terdapat pada Buku 1 yang kemudian diklasifikasi berdasarkan sub-dimensi *Smart City*, yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. Penyusunan Dokumen Masterplan *Smart City* diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan implementasi *Smart City* di Kota Palopo, sehingga mampu mengakselerasi pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada di wilayah Kota Palopo.

Tim Penyusun Masterplan *Smart City*

Kota Palopo

SAMBUTAN KEPALA DAERAH

Alhamdulillah Rabbil'alamin, kepada Allah Swt kita senantiasa memuji seraya bersyukur atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Atas izin-Nya sehingga kita bisa menyelesaikan penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo.

Masterplan Smart City adalah sebuah perencanaan dalam rangka mendorong Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Ia disusun secara kolaboratif partisipatif dengan memperhatikan potensi dan keunggulan daerah baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan infrastruktur pendukung lainnya.



Dengan tersusunnya *Masterplan Smart City* Kota Palopo kita berharap ini menjadi panduan untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota Cerdas yang memberikan manfaat. *Masterplan Smart City* adalah sebuah perencanaan dalam rangka mendorong Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Ia disusun secara kolaboratif partisipatif dengan memperhatikan potensi dan keunggulan daerah baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan infrastruktur pendukung lainnya.

Kota Cerdas merupakan upaya untuk mengintegrasikan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tata kelola sehari-hari baik Tatakelola Pemerintahan maupun Pelayanan Publik sehingga tercipta efisiensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program *Smart City* ini sangat sejalan dengan Visi Kota Palopo yakni Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023, oleh karena itu kita berharap semua pemangku kepentingan dapat bersinergi dengan baik dalam upaya implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sebagaimana yang dituangkan dalam *Quick Win* Tahun 2023.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan pemikiran, perhatian dan seluruh potensi terbaiknya dalam proses Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo.

Palopo, 20 September 2022

WALIKOTA PALOPO

Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH

SAMBUTAN KETUA DEWAN *SMART CITY*

Dalam beberapa tahun ini, Palopo menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks, dinamis dan kadang tanpa prediksi. Hal ini mengonfirmasi kita semua bahwa hari ini, fenomena urban yang baru telah mengubah lanskap perkotaan dan kita butuh perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan.

Saya sangat menyambut baik inisiatif kota ini untuk mendorong konsep kota cerdas (*Smart City*). Visi Palopo memang telah mengamankan kota ini menjadi kota inovatif, sebuah model perkotaan yang mengedepankan kreativitas dan riset dalam mengelola wilayah seluas 252 km persegi dan didiami oleh 187 ribu jiwa.

Peta jalan *Smart City* ini adalah komitmen awal Pemerintah Kota Palopo dalam menggerakkan berbagai potensi dan *stakeholder* yang ada. Kami menyadari bahwa kunci penting dalam pengembangan *Smart City* adalah kepemimpinan pemerintah daerah dalam mengolaborasikan berbagai sumber daya yang ada. Untuk itu, kita berharap semua pihak dapat mengambil peran masing-masing, memperkaya dari berbagai perspektif, dan mengeksekusi melalui program dan kegiatan masing-masing.

Simpul kolaborasi yang dibangun dalam masterplan ini akan menjadi *guideline* kita semua. Komitmen ini adalah ikhtiar kita untuk mewujudkan masyarakat Palopo yang lebih sejahtera melalui tata kelola perkotaan yang lebih efektif, efisien dan berdampak positif. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat niat baik dan upaya kita semua sebagai *enabler* dan *pioneer* dalam mewujudkan Palopo sebagai kota cerdas. Semoga Allah SWT memberi rahmat dan kekuatan atas segala kerja-kerja cerdas ini.



Palopo, 20 September 2022

Ketua Dewan *Smart City*

Drs. H. Firmanza D.P., S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
SAMBUTAN KEPALA DAERAH	3
SAMBUTAN KETUA DEWAN SMART CITY	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Tujuan.....	11
1.3 Landasan Hukum.....	12
1.4 Kerangka Pikir.....	13
BAB II ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY.....	33
2.1 Visi, Misi, dan Sasaran Smart City Daerah.....	33
2.2 Indikator Utama Smart City	37
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY	39
3.1 Smart Governance	39
3.2 Smart Branding.....	40
3.3 Smart Economy	40
3.4 Smart Living.....	41
3.5 Smart Society.....	42
3.6 Smart Environment.....	43
BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH	44
4.1 Rencana Aksi Smart City Daerah.....	44
4.1.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan.....	44
4.1.2 Pengembangan Infrastruktur Pendukung	45

4.1.3	Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak	46
4.1.4	Penguatan Literasi	47
4.2	Rencana Aksi Smart City Setiap Dimensi.....	48
4.2.1	Rencana Aksi Smart Governance	48
4.2.2	Rencana Aksi Smart Branding	52
4.2.3	Rencana Aksi Smart Economy	55
4.2.4	Rencana Aksi Smart Living.....	60
4.2.5	Rencana Aksi Smart Society	63
4.2.6	Rencana Aksi Smart Environment	67
BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH		71
5.1	Peta Jalan Jangka Pendek (2023)	71
5.5.1	Peta Jalan Smart Government	71
5.5.2	Peta Jalan Smart Branding.....	72
5.5.2	Peta Jalan Smart Economy	73
5.5.3	Peta Jalan Smart Living.....	74
5.5.4	Peta Jalan Smart Society	76
5.5.5	Peta Jalan Smart Environment.....	77
5.2	Peta Jalan Jangka Menengah (2024-2027).....	79
5.2.1	Peta Jalan Smart Government	79
5.2.2	Peta Jalan Smart Branding.....	80
5.2.3	Peta Jalan Smart Economy	81
5.2.4	Peta Jalan Smart Living.....	83
5.2.5	Peta Jalan Smart Society	85
5.2.6	Peta Jalan Smart Environment.....	87
5.3	Peta Jalan Jangka Panjang (2028-2032).....	90
5.3.1	Peta Jalan Smart Government	90
5.3.2	Peta Jalan Smart Branding.....	91

5.3.3	Peta Jalan Smart Economy	93
5.3.4	Peta Jalan Smart Living.....	95
5.3.5	Peta Jalan Smart Society	97
5.3.6	Peta Jalan Smart Environment.....	100
BAB VI PENUTUP.....		102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Dimensi <i>Smart City</i>	14
Gambar 1.2. Dimensi <i>Smart City</i>	15
Gambar 1.3. Smart Governance.....	16
Gambar 1.4. Smart Branding.....	18
Gambar 1.5. Smart Economy	20
Gambar 1.6. Smart Living	21
Gambar 1.7. Smart Society.....	23
Gambar 1.8. Smart Environment	24
Gambar 1.9. Kerangka Keterkaitan antara Sasaran <i>Smart City</i> dengan RPJMD.....	26
Gambar 1.10. Kerangka Kodifikasi Program <i>Smart City</i>	26
Gambar 1.11. Standar Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sub Dimensi Smart Governance	16
Tabel 1. 2 Sub Dimensi Smart Branding	18
Tabel 1. 3 Sub Dimensi Smart Economy.....	20
Tabel 1. 4 Sub Dimensi Smart Living	22
Tabel 1. 5 Sub Dimensi Smart Society.....	23
Tabel 1. 6 Sub Dimensi Smart Environment.....	25
Tabel 1. 7 Indikator SNI Dimensi dan Sub Dimensi <i>Smart City</i>	28
Tabel 2.1. Sub-Dimensi, Sasaran, dan Dasar Pemikiran <i>Smart City</i>	35
Tabel 3.1. Strategi Smart Governance.....	39
Tabel 3.2. Strategi Smart Branding	40
Tabel 3.3. Strategi Smart Economy	41
Tabel 3.4. Strategi Smart Living.....	41
Tabel 3.5. Strategi Smart Society	42
Tabel 3.6. Strategi Smart Environment	43

BAB I PENDAHULUAN

Buku *Masterplan Smart City* pada bab 1 menyajikan latar belakang, informasi, serta alasan disusunnya *Masterplan Smart City* Kota Palopo. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan serta landasan kebijakan, regulasi, rujukan hukum, dan dokumen pendukung lain yang digunakan dalam penyusunan dokumen *Smart City* Kota Palopo. Pada bab ini juga menjelaskan tentang hubungan antara buku *Masterplan Smart City* dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dokumen masterplan atau perencanaan lainnya.

1.1 Latar Belakang

Kota Palopo terletak antara 2°53'.15'' - 3°04'.08'' Lintang Selatan dan 120°03'.10'' - 120°14'.34'' Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kota Palopo memiliki batas-batas : utara - Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu; selatan - Kecamatan Bua Kabupaten Luwu; barat - Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja utara; timur - Teluk Bone. Kota Palopo memiliki potensi cukup beragam karena wilayah Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Potensi ini menjadi modal pembangunan melalui berbagai program pemerintah daerah yang mengacu pada dokumen RPJPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dengan visi: "Mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif untuk semua".

Program pembangunan Kota Palopo lebih rinci juga diatur dalam RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan visi: Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan. Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya. Guna mewujudkan visi pembangunan Kota Palopo tersebut, selain melalui misi dalam RPJPD maupun RPJMD daerah, juga diperlukan upaya akselerator pengembangan dan

pengelolaan berbagai sumber daya yang telah dipetakan dalam dokumen tersebut. Salah satu upayanya adalah melalui penerapan konsep *Smart City*. *Smart City* ini merupakan konsep cerdas yang diimplementasikan pada suatu wilayah geografi yang menerapkan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui partisipasi untuk pembangunan dan kesejahteraan yang diatur dalam suatu kebijakan dan peraturan.

Smart City dikenal juga sebagai salah satu konsep mengedepankan inovasi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan suatu wilayah menggunakan bantuan teknologi. Transformasi digital dan perkembangan pembangunan saat ini telah mengarahkan pada adanya pemenuhan kebutuhan pengelolaan daerah melalui konsep kota atau kabupaten cerdas (*Smart City*). Pada tahun 2017 di Indonesia telah dilakukan program Gerakan Mewujudkan 100 *Smart City* (kabupaten/kota) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informasi dan didukung Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kantor Staf Kepresidenan, serta tentu saja para kolega pemerintahan di daerah. Pengembangan *Smart City* di masing-masing lokalitas ini bukan dengan menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir, namun lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Berdasarkan hal tersebut maka berbagai program pembangunan pemerintah Kota Palopo yang dioptimalkan dengan konsep *Smart City* diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan Kota Palopo.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo adalah:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kota Palopo;
2. Untuk memberikan arahan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu menuju ke arah *Smart City*;
3. Untuk mendorong Kota Palopo dalam melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* secara efektif dan efisien; dan

4. Menjadikan Kota Palopo yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga.

1.3 Landasan Hukum

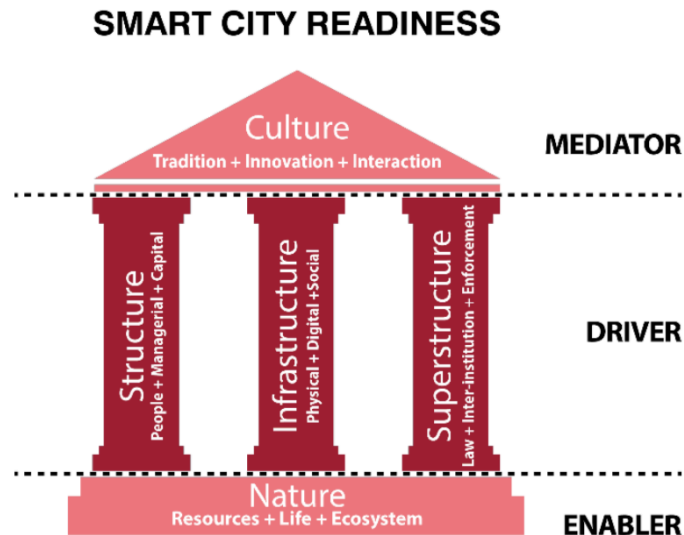
Landasan hukum dari penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pemerintah Kota Palopo
16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kota Palopo
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo
19. Keputusan Walikota Palopo Nomor 247/Vi/2022 Tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo
20. Keputusan Walikota Palopo Nomor 248/Vi/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo

1.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir *Smart City* Kota Palopo disusun berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* – Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Smart City* dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Kota Pintar karena kata pintar menunjukkan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan kata cerdas, namun istilah Kota Cerdas sering kali juga dipergunakan untuk merujuk pada konsep *Smart City*. Istilah *Smart City* ini pada implementasinya diberikan pada kabupaten/kota yang telah memiliki kesiapan daerah pintar/*Smart City Readiness*. Kesiapan daerah yang ditujukan untuk menjadi Daerah Pintar atau *Smart City Readiness* diukur berdasarkan lima aspek utama, seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



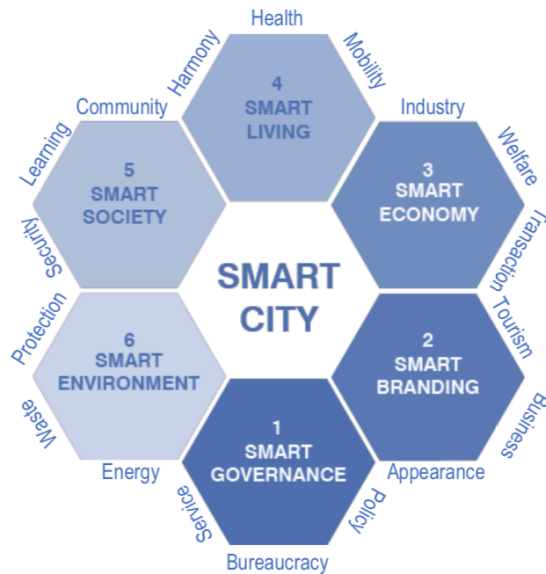
Gambar 1.1. Dimensi *Smart City*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Lima aspek utama yang menjadi ukuran atas kesiapan daerah pintar, yaitu: potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*superstructure*), dan budaya (*culture*). Adapun Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*

Kerangka berikutnya adalah enam dimensi yang perlu ada dalam *Smart City*, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living* dan *smart environment* seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut.



Gambar 1.2. Dimensi *Smart City*

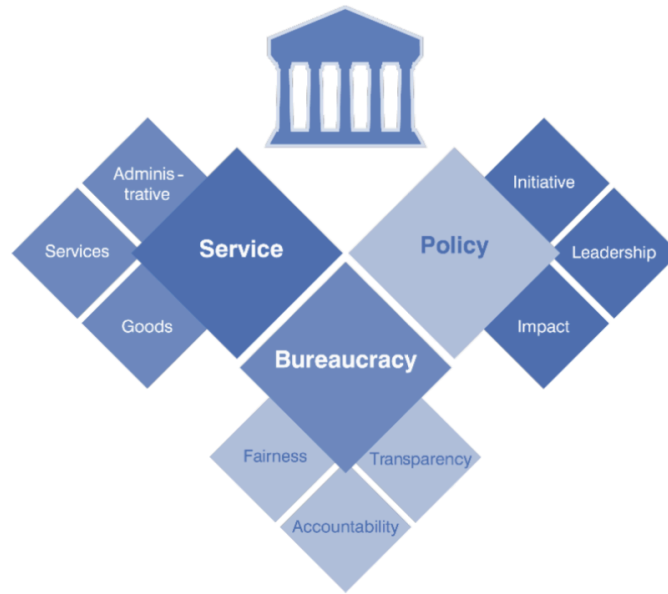
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Masing-masing dari dimensi *Smart City* memiliki 3 sub-dimensi seperti yang akan dijelaskan pada sub-bab berikut:

a. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur antara lain yaitu: Pelayanan publik (*service*); Manajemen birokrasi yang efisien (*bureaucracy*); Efisiensi kebijakan publik (*policy*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.3 sebagai berikut.

SMART GOVERNANCE



Gambar 1.3. *Smart Governance*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Governance* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 1 Sub Dimensi *Smart Governance*

Smart Governance	
Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. • Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain. • Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain
Manajemen Birokrasi yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (<i>fairness</i>), bertanggung-jawab (<i>accountability</i>) dan keterbukaan (<i>transparency</i>). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-

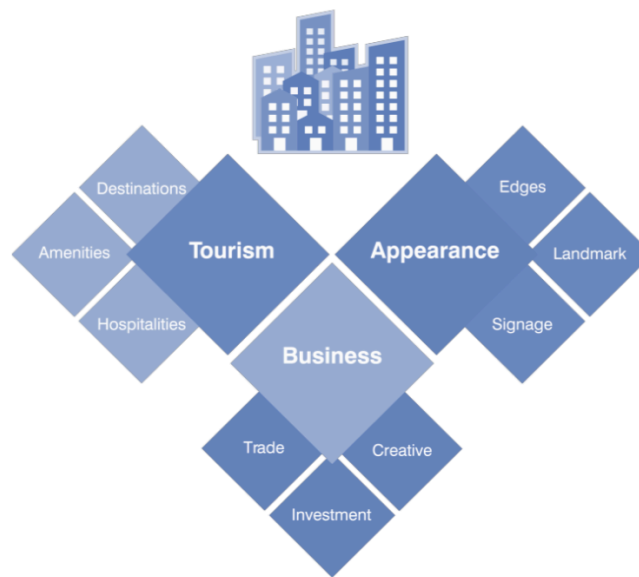
	<p><i>gov</i> harus diarahkan menuju <i>integrated & inter-operability e-gov</i> atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan <i>Smart e-Gov</i>. Pelayanan <i>Smart e-Gov</i> ini perlu didukung dengan sebuah "<i>City Operation Center (COC)</i>".</p>
Efisiensi Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. • Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Sumber: Kemenkominfo, 2022

b. Smart Branding

Smart branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun unsur *smart branding* meliputi tiga hal yaitu: Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*); Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*); Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.4 sebagai berikut.

SMART BRANDING



Gambar 1.4. Smart Branding

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Branding* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 2 Sub Dimensi *Smart Branding*

Smart Branding	
Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (<i>destination</i>). • Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (<i>amenities</i>) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain. • Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (<i>hospitality</i>) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan <i>tour-guide</i> dan lain-lain.
Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya <i>market place</i> daerah. • Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya <i>Investment Lounge, Dashboard</i>, dan Portal Investasi Daerah.

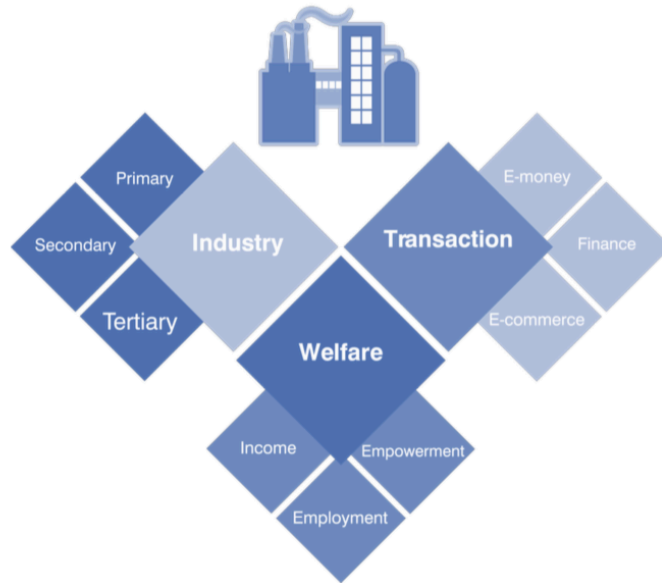
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, <i>fashion</i>, digital, dan lain-lain
Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. • Membangun batas wilayah (<i>edge</i>), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (<i>landmark</i>), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (<i>signage</i>), struktur jalan yang teratur (<i>path</i>), dan titik simpul kota (<i>node</i>) seperti alun- alun, simpang dan lain-lain.

Sumber: Kemenkominfo, 2022

c. Smart Economy

Smart economy dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Tiga unsur dalam *smart economy* meliputi: Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*); Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*); Membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.5 sebagai berikut.

SMART ECONOMY



Gambar 1.5. *Smart Economy*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Economy* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 3 Sub Dimensi *Smart Economy*

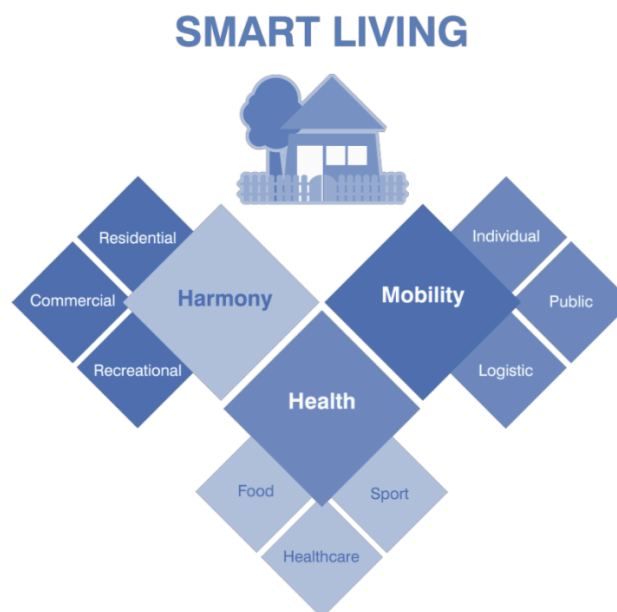
Smart Economy	
Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (<i>industry</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Membangun daya saing industri daerah pada <i>leading sector</i> industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain- lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, <i>packaging</i> dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (<i>Welfare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (<i>income</i>) Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (<i>employment</i>) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>empowerment</i>)

Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang <i>less cash</i> • Mewujudkan masyarakat yang <i>bankable</i> dan memiliki akses terhadap permodalan • Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>market place</i>.
---	---

Sumber: Kemenkominfo, 2022

d. Smart Living

Smart living dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*. Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. *Smart living* terdiri atas tiga indikator yaitu: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*); Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*); Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.6 sebagai berikut



Gambar 1.6. *Smart Living*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Living* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

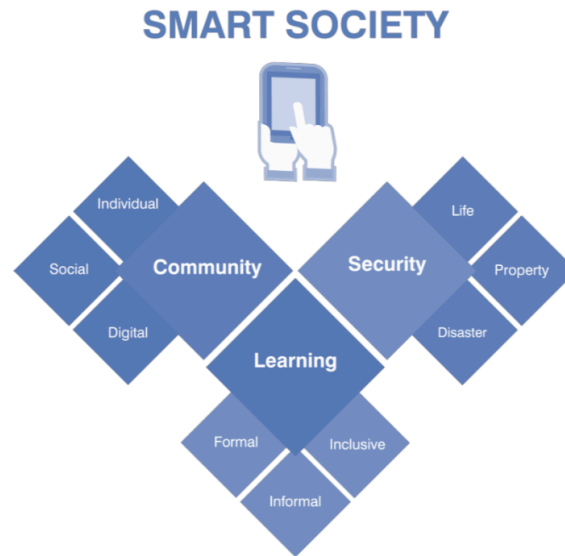
Tabel 1. 4 Sub Dimensi *Smart Living*

<i>Smart Living</i>	
Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (<i>residential</i>), lingkungan pusat kegiatan bisnis (<i>commercial</i>) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (<i>recreational</i>)
Mewujudkan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (<i>food</i>), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (<i>healthcare</i>), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>).
Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (<i>mobility</i>) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Sumber: Kemenkominfo, 2022

e. *Smart Society*

Smart society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis yang memungkinkan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Tiga elemen unsur di dalam *smart society*, yaitu: Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*); Membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*); Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.7 sebagai berikut.



Gambar 1.7. *Smart Society*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Society* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 5 Sub Dimensi *Smart Society*

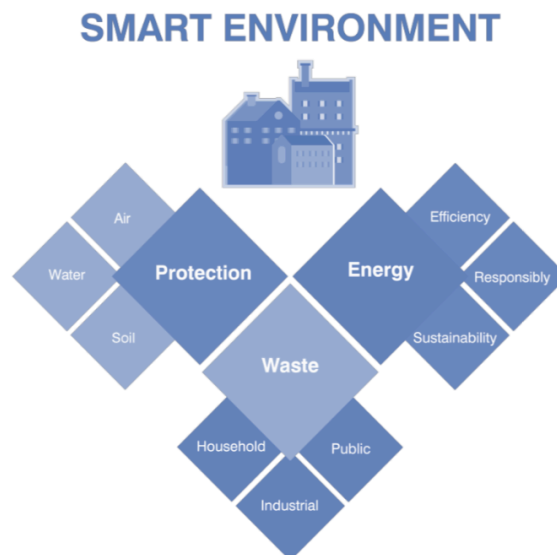
Smart Society	
Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (<i>Community</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan <i>Smart City</i> misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain. • Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang <i>market place</i> dan lain-lain
Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (<i>Learning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable.

	<ul style="list-style-type: none"> Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya <i>smart school, smart campus, smart pesantren, smart training</i> program dan lain-lain
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau <i>Internet of Thing (IoT)</i>.

Sumber: Kemenkominfo, 2022

f. Smart Environment

Smart environment merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran dari *smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Adapun unsur dalam *smart environment* yaitu: Mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*); Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*); Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (*energy*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.8 sebagai berikut.



Gambar 1.8. *Smart Environment*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Environment* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

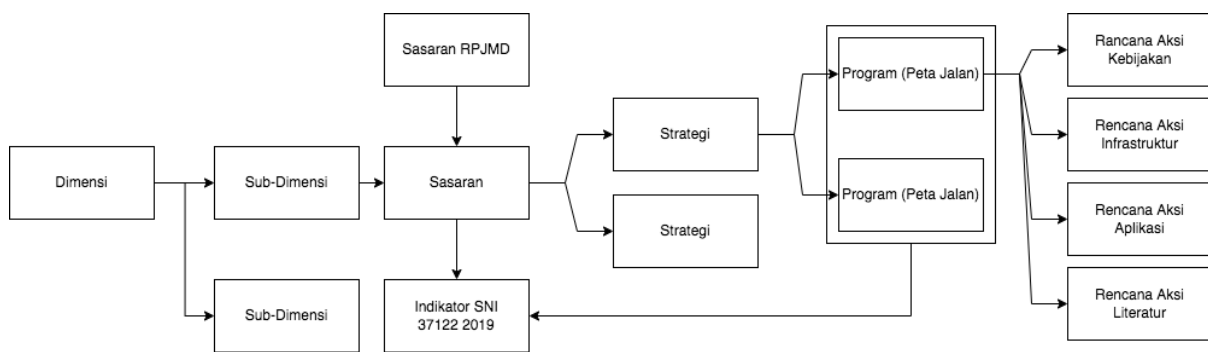
Tabel 1. 6 Sub Dimensi *Smart Environment*

Smart Environment	
Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing</i> (IoT). • Membangun ruang terbuka hijau • Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi • Mengendalikan polusi udara
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (<i>household</i>) • Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>) • Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>) • Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air <i>residensial</i> serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab
Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (<i>Energy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab • Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

Sumber: Kemenkominfo, 2022

Penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan seperti RPJMD, Renstra OPD, dan dokumen perencanaan lainnya. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan *Smart City* dibuat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah termasuk RPJPD dan RPJMD daerah. Pada dokumen RPJMD hubungan

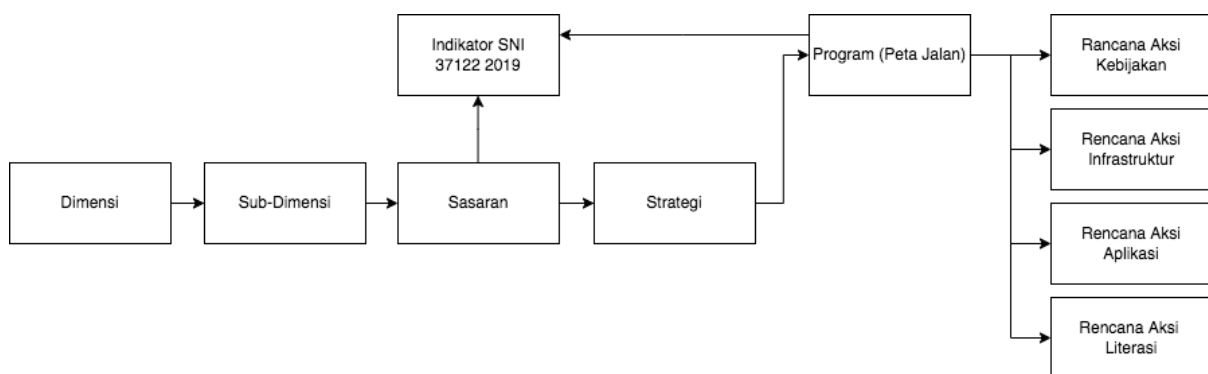
keterkaitan antara Masterplan *Smart City* dan RPJMD terletak pada tingkat sasaran, yaitu sasaran *Smart City* dan sasaran RPJMD. Lebih jauh, sasaran *Smart City* perlu dicapai melalui serangkaian strategi dan program *Smart City*, baik program pada Peta Jalan *Smart City*, maupun program pada rencana aksi pembangunan *Smart City* seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.9 sebagai berikut .



Gambar 1.9. Kerangka Keterkaitan antara Sasaran *Smart City* dengan RPJMD

Sumber: Kemenkominfo, 2022

Di samping itu, untuk memudahkan dalam penyajian sasaran, strategi dan program-program *Smart City* di dalam Masterplan, maka dapat disusun kodifikasi pada masterplan *Smart City* mulai dari dimensi *Smart City* dan sub-dimensi *Smart City* sebagaimana relasinya dapat dilihat pada Gambar 1.10 di bawah ini.



Gambar 1.10. Kerangka Kodifikasi Program *Smart City*

Sumber: Kemenkominfo, 2022

Penyusunan Visi Misi Masterplan *Smart City* Kota Palopo didasarkan pada Visi Misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023. Ditinjau berdasarkan

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penyusunan Masterplan *Smart City* tersirat dalam tujuan nomor 17 yaitu *sustainable cities and communities* serta tertuang dalam indikator perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan SNI ISO 37122:2019. *Smart City* dalam hubungannya dengan ISO 37122, dimaksudkan untuk memberikan berbagai indikator dalam mengukur kemajuan ke arah kota pintar. Untuk menjamin implementasi dan keberlanjutan program *Smart City* yang diusulkan, program *Smart City* disesuaikan dengan rencana strategis (Renstra) OPD. Selain itu, dalam analisis kesiapan daerah terutama aspek infrastruktur fisik dan digital, Masterplan *e- Government* menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dasar dalam penyusunan dokumen masterplan. Struktur acuan standar seperti pada gambar 1.11 sebagai berikut.



Gambar 1.11. Standar Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan

Sumber: Kemenkominfo, 2022

SNI ISO 37122:2019 merupakan standar pertama dalam SNI ISO 37120 “Pembangunan berkelanjutan masyarakat – Indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup”. Standar ini memperkenalkan dasar umum untuk pelaporan, perbandingan dan tolok ukur kinerja. SNI ISO 37122:2019 menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi untuk serangkaian indikator untuk kota cerdas. Mempercepat perbaikan pelayanan dan kualitas hidup merupakan bagian penting dalam definisi kota cerdas. Adapun dokumen ini, dalam hubungannya dengan ISO 37120, dimaksudkan untuk memberikan satu set lengkap berbagai indikator untuk mengukur kemajuan ke arah kota pintar.

Tujuan Dokumen SNI ISO 37122:2019 antara lain adalah:

1. Menggunakan informasi data dan teknologi modern untuk memberikan layanan dan kualitas hidup yang lebih baik kepada mereka yang berada di kota (penduduk, bisnis, pengunjung);
2. Menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik di mana kebijakan, praktik, dan teknologi yang cerdas digunakan untuk melayani warga negara;
3. Mencapai tujuan keberlanjutan dan lingkungan mereka dengan cara yang lebih inovatif;
4. Mengidentifikasi kebutuhan dan manfaat infrastruktur pintar;
5. Memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan;
6. Membangun ekonomi yang dinamis dan inovatif yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Tabel 1. 7 Indikator SNI Dimensi dan Sub Dimensi *Smart City*

Sub dimensi	Indikator SNI
Smart Governnave	
Layanan Publik	SNI 10. Pemerintahan 10.1 Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk 10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 10.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	SNI 18. Telekomunikasi 18.1 Persentase populasi kota dengan akses ke peta lebar (<i>broadband</i>) berkecepatan memadai 18.2 Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota 10.4 Rata-rata waktu henti (<i>downtime</i>) infrastruktur teknologi informasi kota
	SNI 5. Ekonomi 5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
Manajemen Birokrasi	SNI 21. Perencanaan Kota 21.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan. 21.2 Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik. 22.3 Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari). 22.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi.

Sub dimensi	Indikator SNI
Efisiensi Kebijakan Publik	-
Smart Branding	
Pariwisata	SNI 14. Rekreasi 14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring SNI 17 b. Budaya 17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 17b.2 Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan
Business Branding	-
Wajah Kota	-
Smart Economy	
Industri Berdaya Saing	SNI 20. Pertanian perkotaan / lokal dan ketangguhan pangan 20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan. 20.2 Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton). 20.3 Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring.
Kesejahteraan Masyarakat	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk. 5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan.
Transaksi Keuangan	SNI 9. Keuangan 9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri. 9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik.
Smart Living	
Harmonisasi Tata Ruang	SNI 12. Perumahan 12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar. 12.2 Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar.
Kesehatan	SNI 11. Kesehatan 11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan. 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk. 11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (<i>real time</i>) untuk saran kualitas udara dan air.
Transportasi	SNI 19. Transportasi 19.1 Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (<i>real time</i>).

Sub dimensi	Indikator SNI
	<p>19.2 Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk.</p> <p>19.3 Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi.</p> <p>19.4 Jumlah sepeda yang tersedia melalui layanan berbagi sepeda yang disediakan oleh kota per 100.000 penduduk.</p> <p>19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.</p> <p>19.6 Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu.</p> <p>19.7 Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik.</p> <p>Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir langsung (<i>real time</i>).</p> <p>19.8 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas.</p> <p>19.9 Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (<i>real time</i>) sebagai persentase dari total luas kota.</p> <p>19.10 Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan otonom (<i>autonomous</i>).</p> <p>19.11 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komputer.</p> <p>19.12 Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom.</p> <p>19.3 Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor.</p>
Smart Society	
Interaksi Masyarakat	<p>SNI 13. Populasi dan Kondisi Sosial</p> <p>13.1 Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus.</p> <p>13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.</p> <p>13.3 Persentase penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses</p> <p>13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.</p>
Ekosistem Belajar yang efisien	<p>SNI 6. Pendidikan</p> <p>16.1 Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa.</p> <p>16.2 Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa.</p> <p>16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.</p>
	<p>SNI 17.a. Olahraga</p> <p>17.1 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul <i>e-book</i> per 100.000 penduduk.</p>

Sub dimensi	Indikator SNI
	17.2 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif.
Keamanan	SNI Keamanan Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital.
Smart Environment	
Proteksi Lingkungan	SNI 22. Air Limbah 22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali. 22.2 Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering). 22.3 Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota. 22.4 Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi. 22.5 Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh sistem sensor data <i>tracking real time</i> .
	SNI 23. Air 23.1 Persentase air minum yang dilacak oleh stasiun pemantauan kualitas air langsung (<i>real time</i>). 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (<i>real time</i>) per 100.000 populasi. 23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem. 23.5 Persentase bangunan di perkotaan dengan meteran air cerdas.
Tata Kelola Sampah dan Limbah	SNI 16. Limbah Padat 10.Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering. 11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga. 12.Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi. 13.Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota. 14.Persentase tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor. 15.Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang.
	SNI Lingkungan dan Perubahan Iklim 16.Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau. 17.Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (<i>real time</i>) per kilometer persegi (km ²) 18.Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan.
Tata Kelola Energi	SNI 7. Energi 7.1 Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu.

Sub dimensi	Indikator SNI
	<p>7.2 Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun.</p> <p>7.3 Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun.</p> <p>7.4 Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi.</p> <p>7.5 Kapasitas penyimpanan jaringan energi kota per total konsumsi energi kota.</p> <p>7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.</p> <p>7.8 Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang.</p> <p>7.9 Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan.</p> <p>7.10 Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas.</p> <p>7.11 Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar.</p>

BAB II ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Arah Pembangunan *Smart City* pada Bab II disusun untuk mengidentifikasi indikator utama dalam *Smart City* Kota Palopo yang disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* yang sudah dirumuskan sebelumnya. Indikator utama *Smart City* dianalisis untuk setiap masing-masing sub dimensi dalam mencapai tujuan *Smart City* Kota Palopo.

2.1 Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Daerah

Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis strategi pembangunan melalui analisis SWOT. Analisis Visi Pembangunan *Smart City* bertujuan untuk menyelaraskan visi misi pembangunan daerah termasuk RPJP dan RPJMD daerah dengan Visi Misi *Smart City* yang akan disusun. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh Visi *Smart City* Kota Palopo berupa:

“PALOPO KOTA KEBERSAMAAN”

**Kota Palopo yang “Kolaboratif”, “Edukatif”, “Berbudaya”, “Empati”, “Religius”, “Sehat”,
“Aman”, “Maju”, “Akseleratif”, “Adaptif”, dan “Nyaman”**

"Kebersamaan" memiliki makna bahwa Kota Palopo dibangun dan dikembangkan dalam ikatan yang didasari oleh nilai kekeluargaan dan persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional, tetapi memiliki visi, kepedulian, kerendahan hati, dan mendahulukan kepentingan bersama. Adapun penjabaran makna dari Visi *Smart City* Kota Palopo Kebersamaan adalah sebagai berikut :

- **Kolaboratif:** Kota yang mengedepankan konsep kerja sama yang dinamis, dialogis, namun tetap harmonis untuk mencapai kondisi yang lebih baik
- **Edukatif:** Kota yang mampu memberikan dan menyediakan pendidikan berdaya saing, memberi ruang bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan menjamin pengembangan potensi.
- **Berbudaya:** Kota yang dikembangkan dengan melestarikan warisan budaya.

- **Empati:** Kota yang penyelenggaraan layanan pemerintahan dan dinamika kehidupan sosial dilaksanakan berdasarkan bela rasa dan saling peduli dalam kerangka solidaritas.
- **Religius:** Kota yang meletakkan kepatuhan terhadap ke-Tuhan-an, dan implementasi nilai sosial, moral, norma, etika, tradisi, kearifan lokal dan toleransi sebagai fondasi kehidupan.
- **Sehat:** Kota yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, dan berupaya menyediakan dimensi permukiman, lalu lintas dan transportasi, industri, perkantoran dan pariwisata yang sehat.
- **Aman:** Kota yang memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, dan kebebasan dari segala bentuk ancaman mental maupun spiritual
- **Maju:** Kota yang menempatkan aspek kemudahan, kecepatan, keteraksesan dan kualitas layanan sebagai dimensi utama pada semua aspek.
- **Akseleratif:** Kota yang selalu berupaya mempercepat, mengembangkan potensi dan kondisi ke arah yang lebih baik melalui sikap kreatif dan inovatif
- **Adaptif:** Kota yang mengimplementasikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman
- **Nyaman:** Kota yang menyediakan lingkungan dan dinamika kehidupan perkotaan yang terbuka, keramah-tamahan, dan menghormati pluralisme,

Berdasarkan Visi *Smart City* Kota Palopo tersebut, untuk memperjelas dalam pelaksanaan mewujudkan visi *Smart City*, diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi *Smart City*. Penekanan misi *Smart City* Kota Palopo yang ditekankan pada visi yakni “Kota Palopo yang “Kolaboratif”, “Edukatif”, “Bersih”, “Empati”, “Religius”, “Sehat”, “Aman”, “Maju”, “Akseleratif”, “Akuntabel”, dan “Nyaman”. Adapun misi *Smart City* Kota Palopo antara lain:

- Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi.

- Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebijakan pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi.
- Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan dengan berbasis pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya
- Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan konektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi.

Visi Misi *Smart City* Kota Palopo tersebut menjadi acuan dalam penyusunan sasaran *Smart City* Kota Palopo yang merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan *Smart City*. Adapun sasaran *Smart City* Kota Palopo, yaitu:

Tabel 2.1. Sub-Dimensi, Sasaran, dan Dasar Pemikiran Smart City

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
<i>Smart Governance</i>	Layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem pelayanan terpusat,	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
	Birokrasi	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Perancangan Kebijakan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan	Indeks Pembangunan Manusia
<i>Smart Branding</i>	Pariwisata	Meningkatnya aktivitas pariwisata Terutama melalui kegiatan pariwisata budaya, pendidikan, dan kesehatan,	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
	Daya Saing Bisnis	Industri pariwisata	Jumlah UKM Jumlah kunjungan wisatawan
	Wajah Kota	Pengembangan destinasi taman kota, terutama kawasa industri	Persentase ruang terbuka hijau Persentase rumah layak huni
<i>Smart Economy</i>	Ekosistem Industri	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat. Ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indikator Angka Kemiskinan Indeks Gini
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas melalui: Pelayanan transaksi elektronik pada bidang administrasi publik, pendidikan, dan kesehatan Pengembangan sarana prasarana transaksi di wilayah destinasi taman kota	Produktivitas total daerah Kontribusi PAD
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan. Taman kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik
	Kesehatan	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Pelayanan dan wisata Kesehatan	Indeks Kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategis daerah. Akses pendukung destinasi wisata budaya, pendidikan, dan kesehatan	Indeks Aksesibilitas Wilayah
<i>Smart Society</i>	Interaksi Masyarakat	Pengembangan taman kota tematik sesuai sasaran kelompok masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	Ekosistem Belajar/Pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	Keamanan Masyarakat	Jaminan keamanan aktivitas wisata	Angka kriminalitas
<i>Smart Environment</i>	Proteksi Lingkungan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau publik melalui taman kota	Persentase ruang terbuka hijau publik

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Pengelolaan sampah dan limbah pendukung pengembangan destinasi wisata taman kota	Persentase jumlah sampah dikelola
	Tata Kelola Energi	Penggunaan teknologi terbaru pada ruang publik	Jumlah penggunaan teknologi terbaru

2.2 Indikator Utama *Smart City*

Perwujudan *Smart City* Kota Palopo dirumuskan dalam 4 misi *Smart City* Kota Palopo yang mendukungnya dan dapat dicapai melalui enam sub-dimensi *Smart City* yang menjadi indikator utama *Smart City*, yaitu: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environmet*. Adapun masing-masing misi dengan indikator *Smart City* Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Keterkaitan Misi *Smart City* Kota Palopo dengan Dimensi *Smart City*

No	Isu Strategis	Misi RPJMD	Misi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
1	Pelayanan publik dan pemenuhan SPM, serta tatakelola dan Reformasi Birokrasi	Modernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi.	Smart Governance
2	Pendidikan, Kesehatan, kemandirian	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebijakan	Smart Living, Smart Economy

No	Isu Strategis	Misi RPJMD	Misi <i>Smart City</i>	Dimensi Smart City
	pangan, dan industri	Peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis serta Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi.	
3	Ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.	Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan dengan berbasis pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya	Smart Society
4	Pemukiman dan perumahan serta infrastruktur daerah	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau.	Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan konektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi.	Smart Society, Smart Environment

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Bab III Strategi Pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil analisis strategi *Smart City* Kota Palopo yang dianalisis berdasarkan hasil analisis kesenjangan (GAP), SWOT, dan TOWS. Strategi pembangunan *Smart City* digunakan sebagai salah satu langkah dalam mencapai Visi Misi *Smart City* Kota Palopo melalui penyusunan strategi yang ada berdasarkan masing-masing dimensi yang kemudian dirinci menjadi masing-masing sub dimensi

3.1 *Smart Governance*

Smart Governance merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan terintegrasi. Beberapa sub- dimensi yang ada berupa layanan publik (*public services*), birokrasi (*bureaucracy*), dan perancangan kebijakan (*policy design*). Adapun dalam pembangunan *Smart City* Kota Palopo, Strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada dimensi ini difokuskan pada pengembangan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Governance* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Strategi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Strategi
G.1 Layanan Publik	G.1.1 Pengembangan pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan media digital dan peningkatan aksesibilitas data dan informasi melalui pengembangan sistem pengelolaan data terpusat
G.2 Birokrasi	G.2.1 Pengembangan sistem pengawasan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah G.2.2 Pengembangan sistem koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.1 Pengembangan sistem koordinasi perancangan kebijakan pemerintah daerah

3.2 Smart Branding

Smart Branding merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu membangun citra Kota Palopo, terutama sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif untuk semua, sesuai dengan visi dalam RPJPD Kota Palopo. *Smart Branding* masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang pertama. Sub-dimensi yang ada pada *Smart Branding* adalah pariwisata (*tourist*), daya saing bisnis (*Business Competitiveness*), dan wajah (tampilan) kota (*Face of The City*). Adapun strategi dan arah kebijakan *Smart City* Kota Palopo difokuskan pada Peningkatan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Branding* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Strategi Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi
B.1 Pariwisata	B.1.1 Peningkatan pelayanan pariwisata Kota Palopo melalui teknologi informasi dan media digital. B.1.2 Peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo
B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Peningkatan sistem informasi pelayanan investasi bisnis di Kota Palopo
B.3 Wajah Kota	B.3.1 Peningkatan aksesibilitas data dan informasi infrastruktur dan fasilitas publik bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo

3.3 Smart Economy

Smart Economy merupakan salah satu dimensi dalam konsep *Smart City* yang bertujuan untuk bidang usaha masyarakat sehingga mampu beradaptasi sesuai tantangan di era informasi dengan cara yang cerdas. Dimensi *Smart Economy* masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang ketiga. Terdapat 3 sub dimensi pada *Smart Economy*, yaitu: ekosistem industri (*industry*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi

keuangan (*transaction*). Adapun strategi pada dimensi *Smart Economy* ini difokuskan untuk Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan, serta mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Economy* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Strategi Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi
E.1 Ekosistem Industri	E.1.1 Pengembangan sistem koordinasi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. E.1.2 Pengembangan akses data dan informasi investasi guna mendorong perluasan kesempatan berusaha
E.2 Kesejahteraan Masyarakat	E.2.1 Pengembangan sistem pelayanan peningkatan usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
E.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	E.3.1 Peningkatan pelayanan transaksi keuangan, terutama pada bidang administrasi publik, pendidikan, Kesehatan, dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital

3.4 Smart Living

Smart living merupakan salah satu dimensi *Smart City* yang digunakan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui sub dimensi dalam *Smart Living*. Terdapat tiga sub dimensi dalam *Smart Living* yaitu: kelayakan pola hidup (*harmony*), kelayakan kualitas kesehatan (*health*), dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di suatu daerah (*mobility*). Dimensi *Smart Living* ini masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang kedua, yaitu mendorong pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi. Strategi dalam *Smart Living* ini terutama ditujukan untuk Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerja sama daerah sehingga dapat terwujud visi yang dibentuk. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Living* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Strategi Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi
L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.1 Pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi penataan ruang daerah L.1.2 Pembentukan sistem koordinasi pengembangan penataan ruang daerah kumuh
L.2 Kesehatan	L.2.1 Peningkatan akses data dan informasi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital L.2.2 Peningkatan pelayanan Kesehatan melalui pengembangan sistem koordinasi pelayanan kesehatan daerah
L.3 Transportasi	L.3.1 Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan penunjang peningkatan angka kunjungan Kota Palopo

3.5 Smart Society

Smart Society merupakan salah satu dalam dimensi *Smart City* yang digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan lingkungan masyarakat yang cerdas. Dimensi *Smart Society* ini masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang ke empat dengan tersedianya pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan konektivitas sistem pelayanan publik sehingga terbentuk sumber daya manusia yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat digunakan Sub Dimensi dalam *Smart Society*, yaitu: komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*). Strategi dalam dimensi *Smart Society* ini khususnya difokuskan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Society* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Strategi Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi
S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Peningkatan akses data dan informasi kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital

S.2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital
S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.1 Peningkatan pelayanan keamanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital

3.6 Smart Environment

Smart Environment merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan untuk mendorong terwujudnya keseimbangan ekosistem guna kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat dengan menjaga kualitas lingkungan. Dimensi *smart environment* masuk ke dalam misi *Smart City* yang kedua, yaitu mendorong pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam *Smart Environment* digunakan tiga sub dimensi, yaitu proteksi lingkungan (*Environmental Protection*), pengelolaan sampah dan limbah (*Waste Management*). Adapun strategi dalam *Smart Environment* Kota Palopo difokuskan untuk meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Environment* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Strategi Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi
Proteksi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem koordinasi pengawasan dan evaluasi perlindungan lingkungan Kota Palopo
Pengelolaan Sampah dan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi dan aksesibilitas pengelolaan sampah dan limbah Kota Palopo
Tata Kelola Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sarana prasarana tata kelola energi pada fasilitas publik

BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH

Rencana aksi merupakan tahapan yang akan dilakukan untuk terwujudnya visi misi *Smart City* Kota Palopo yang dirumuskan berdasarkan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023. Dalam melaksanakan rencana aksi *Smart City* dibutuhkan suprastruktur berupa kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur jaringan dan *data center*, serta pengembangan aplikasi yang sesuai dengan potensi daerah dan tuntutan perkembangan teknologi.

4.1 Rencana Aksi *Smart City* Daerah

Rencana aksi *Smart City* Kota Palopo terdiri atas 4 bagian, yaitu Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*, serta Penguatan Literasi *Smart City* Daerah.

4.1.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program *Smart City* sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Adapun, kelembagaan merupakan perangkat non-fisik dari sisi pengelola kota yang bertujuan untuk mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan *Smart City* Daerah. Rencana aksi dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan ini berperan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan *Smart City* di Kota Palopo. Adapun rencana aksi pengembangan kebijakan dan kelembagaan di Kota Palopo antara lain yaitu:

4.1.1.1 Kebijakan

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan Masterplan *Smart City* Kota Palopo seperti Perda Masterplan *Smart City*, Perda Dewan *Smart City*, Tim Pelaksana *Smart City*,
2. Penyusunan Program *quick wins* yang ditetapkan sesuai dengan urgensi permasalahan yang ada di Kota Palopo melalui berbagai kerja sama dan sinergitas berbagai *stakeholder*.
3. Penetapan kebijakan program *Smart City* yang disesuaikan dengan perencanaan anggaran tahunan guna menjamin pelaksanaan

4. Penetapan kebijakan yang menjamin keberlanjutan program *Smart City*, yaitu: *smart governance, smart branding, smart living, smart economy, smart society* dan *smart environment* di Kota Palopo
5. Penetapan berbagai kebijakan pendukung dalam mencapai *Smart City* Kota Palopo yang meliputi penggunaan teknologi dan sistem informasi.
6. Penetapan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam Masterplan *Smart City* Kota Palopo

4.1.1.2 Kelembagaan

1. Pembentukan Dewan *Smart City* Daerah
2. Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah
3. Pembentukan Forum *Smart City* Daerah
4. Pembentukan Tim Perencana dan Evaluator Kebijakan Pendukung *Smart City*
5. Pembentukan Tim Perencana dan Evaluator Aplikasi Pendukung *Smart City*
6. Pembentukan Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Pendukung *Smart City*
7. Pembentukan Tim Penguatan Literasi Pendukung *Smart City*

4.1.2 Pengembangan Infrastruktur Pendukung

4.1.2.1 Pengembangan Infrastruktur Fisik

1. Penambahan jaringan *publik internet hotspot*;
2. Penyediaan *bandwidth* internet;
3. Pembangunan *command center*
4. Penyediaan listrik yang stabil dan terjamin suplainya 7x24 jam;
5. Pembangunan dan perbaikan jalan;
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah;
7. Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik baik fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah;
8. Pembangunan dan pengembangan amenitas wisata; dan

9. Pembangunan dan pengembangan jalur transportasi antar wilayah seperti pengembangan bandara, pembangunan jembatan, terminal, pelabuhan, dan lain sebagainya

4.1.2.2 Pengembangan Infrastruktur Digital

1. Pemanfaatan Teknologi *Cloud Computing* (Komputasi Awan) sehingga pengembangan layanan-layanan TIK dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses ketersediaan infrastruktur *server* dengan *Service Level Agreement (SLA)*. *Cloud Computing* mampu mewujudkan percepatan *e- Government*, memudahkan *sharing* informasi;
2. Perluasan dan penguatan akses jaringan internet di seluruh wilayah;
3. Pembangunan jaringan *fiber optic*;
4. Pengembangan *free hotspot* di area publik;
5. Pengadaan *server* untuk aplikasi untuk menciptakan efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
6. Penyiapan *Disaster Recovery System* atau pemulihan sistem dari akibat bencana agar proses penanganan masalah

4.1.3 Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak menjadi salah satu sarana utama pendukung ketercapaian *Smart City*. Dalam pembangunan *Smart City* Kota Palopo, aplikasi dan perangkat lunak dalam bentuk sistem operasi server, *Tool Assessment*, *Data Warehouse*, Sistem Operasi Server, Aplikasi layanan *online*, Aplikasi, *Website*, Media sosial, Antivirus, Firewall, SSL, *Domain* dan *Hosting* yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan *Smart City* Kota Palopo seperti:

1. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pelayanan pemerintah yang mencakup sub dimensi *Smart Governance*, baik itu dalam penyajian informasi maupun dalam pelayanan transaksi dan penyediaan dokumen kependudukan
2. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan pariwisata Kota Palopo dan aspek lain yang mencakup sub-dimensi *Smart Branding*. Terutama yang mendukung pengembangan Kota Palopo sebagai kota kunjungan wisata Kesehatan, pendidikan, dan budaya.

3. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan aktivitas ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan yang mencakup sub-dimensi *Smart Economy*. Dalam aspek ini terutama untuk pengembangan kawasan industri dan ekonomi kreatif.
4. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan Kota Palopo sebagai kota yang nyaman dan aman serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup sub-dimensi *Smart Living* dan *Smart Society*.
5. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan Kota Palopo sebagai kota yang bersih, sehat dan harmonis dengan lingkungan yang mencakup sub-dimensi *Smart Environment*.

4.1.4 Penguatan Literasi

Penguatan literasi menjadi salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai pembangunan *Smart City* Kota Palopo. Melalui penguatan literasi maka pembangunan *Smart City* Kota Palopo dapat dicapai lebih cepat dan melibatkan lebih banyak pihak sehingga tidak ada yang ditinggalkan. Penguatan literasi Kota Palopo berkaitan erat dengan sub-dimensi *Smart City*, yaitu:

1. Penguatan literasi pelayanan pemerintah yang berkualitas dan transparan
2. Penguatan literasi *Smart City* sebagai kota kunjungan wisata Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
3. Penguatan literasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
4. Penguatan literasi pencapaian Kota Palopo yang religius sehat, aman, dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi informasi.
5. Penguatan literasi Kota Palopo

4.2 Rencana Aksi *Smart City* Setiap Dimensi

4.2.1 Rencana Aksi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
G.1 Layanan Publik	G.1.1 Pengembangan pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan media digital dan peningkatan aksesibilitas data dan informasi melalui pengembangan sistem pengelolaan data terpusat	G.1.1 P.1 Pengembangan sistem informasi pelayanan publik: Aplikasi akte kelahiran dan Kematian; dan <i>Dashboard</i> Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.	2022	Pengadaan server untuk mendukung / <i>hosting</i> aplikasi dan data akte kelahiran / kematian; Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi dan sistem <i>dashboard</i>	2023	Pengembangan aplikasi akte kelahiran dan kematian; Pengembangan sistem dashboard kependudukan dan capil	2023	Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial; Pendayagunaan komunitas untuk penyebaran program	2023	DUKCAPIL
		G.1.1 P.2 Pengembangan aplikasi Mabassa (Mudah Akuntabel Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik & Aman)	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.	2022	Pengadaan server untuk mendukung / <i>hosting</i> aplikasi dan data Mabassa	2023	Pengembangan aplikasi Mabassa	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Mabassa	2023	DPMPPTSP
		G.1.1 P.3 Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik : Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kota Palopo	Pembuatan Perwali tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) Kota Palopo	2022-2026	Akses layanan internet	2022-2026	Aplikasi LAPOR Mobile (Android)/IOS	2022-2026	Sosialisasi dan bimbingan teknis Admin Lapor	2022-2026	DISKOMINFO

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan portal layanan informasi publik "Palopo One Service Integrated System"	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.	2023	Maintenance Server, Jaringan Intranet, Database Aplikasi	2023	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) "Palopo One Service Integrated System"	2023	Panduan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2023	Diskominfo
G.2 Manajemen Birokrasi yang Efisien	G.2.1 Pengembangan sistem pengawasan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	G.2.1 P.1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan secara rutin dan berkala)	Pengembangan cakupan pelayanan Aplikasi E Audit	2024	Pengadaan ruang informasi dan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengawasan kebijakan kepala daerah	2024	Maintenance aplikasi E Audit	2024	Rencana Pembuatan Peraturan walikota tentang penggunaan E Audit terintegrasi	2024	INSPEKTORAT
		G.2.1 P.2 Kegiatan Evaluasi dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Pengembangan cakupan pelayanan Aplikasi E Audit	2023	Penambahan kapasitas MBS, Penambahan SDM Operator tertentu, Pengadaan sarana prasarana, maintenance aplikasi E Audit	2023	Maintenance aplikasi E Audit	2023	Sosialisasi penggunaan aplikasi E Audit	2023	
	G.2.2 Pengembangan sistem koordinasi pelaksanaan program	G.2.2 P.1 Siduppa (Kolaborasi Data & Informasi Urusan Pembangunan Daerah)	Pengembangan aturan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	2023	Penambahan kapasitas MBS, Penambahan SDM Operator tertentu, Pengadaan sarana prasarana, maintenance Siduppa		Maintenance aplikasi Siduppa		Sosialisasi pemanfaatan Siduppa		BAPPEDA

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	pemerintah daerah.	Penelitian dan pengembangan daerah	Penyusunan Rekomendasi hasil kelitbang bidang Sosial, Ekonomi dan pemerintahan	2023	Data terkait bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan	2023	Aplikasi Sistem Penelitian pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan (database penelitian)	2023	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan	2023	BALITBANG
			Penyusunan Rekomendasi hasil kelitbang bidang inovasi, pengembangan wilayah dan SDA	2023	Data terkait bidang inovasi. Pengembangan wilayah dan SDA	2023	Aplikasi Sistem Penelitian pengembangan bidang inovasi. Pengembangan wilayah dan SDA (Data base penelitian)	2023	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang inovasi. Pengembangan wilayah dan SDA	2023	
			Pengembangan Inovasi Daerah	2023	Data inovasi daerah pada SKPD se Kota Palopo	2023	Aplikasi e-Innovation (Database seluruh inovasi di SKPD)	2023	Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi daerah	2023	
		G.2.2 P.2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan secara rutin dan berkala (Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah)	Rencana pembuatan peraturan wali kota tentang penggunaan E-Audit	2024	Pengadaan ruangan khusus	2024	Pengadaan sarana prasarana	2024	Sosialisasi penggunaan E-Audit terintegrasi	2024	INSPEKTORAT
		G.2.2 P.3 Kegiatan Evaluasi dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Rencana pembuatan peraturan wali kota	2024	Pengadaan ruangan khusus	2024	Penambahan kapasitas MBS, Penambahan SDM Operator	2024	Sosialisasi penggunaan E-	2024	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		(Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah)	tentang penggunaan E-Audit				tertentu, Pengadaan sarana prasarana, <i>Maintenance</i>		Audit terintegrasi		
		G.2.2 P.4 Siptlhp (Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Rencana pembuatan peraturan walikota tentang penggunaan E-Audit	2024	Pengadaan ruangan khusus	2024	Penambahan kapasitas MBS, Penambahan SDM Operator tertentu, Pengadaan sarana prasarana, <i>Maintenance</i>	2024	Sosialisasi penggunaan E-Audit terintegrasi	2024	
G.3 Efisiensi Kebijakan Publik	G.3.1 Pengembangan sistem koordinasi perancangan kebijakan pemerintah daerah	G.3.1 P.1 Pengembangan aplikasi e-Sakip	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo	2023	Pengadaan Server dan database	2023	Aplikasi berbasis web e-Sakip	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-Sakip	2023	SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
		G.3.1 P.2 Pengembangan aplikasi manajemen kepegawaian terintegrasi : Simpeg, e-Kinerja dan Absensi Online	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo	2023	Pengadaan Server dan database	2023	Aplikasi berbasis web e-Kinerja dan Absensi Online	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-Kinerja dan Absensi Online	2023	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		G.3.1 P.3 Optimalisasi sistem informasi penganggaran dan akuntansi pelaporan melalui aplikasi SIPD	Pembuatan Perwali tentang SIPD Pemerintah Kota Palopo	2023	Akses Internet (<i>Bandwith Dedicated</i>)	2023	Integrasi data menggunakan <i>web service</i> (API)	2024	Bimtek Admin OPD	2023	BPKAD
		G.3.1 P.4 Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Gaji ASN (SimGaji)	Pembuatan Perwali tentang sistem informasi manajemen Gaji ASN Pemerintah Kota Palopo	2023	Akses Internet (<i>Bandwith Dedicated</i>)	2023	Integrasi data menggunakan <i>web service</i> (API)	2024	Bimtek Admin OPD	2023	
		G.3.1 P.5 Pengembangan sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (Simbada) Terintegrasi	Pembuatan Perwali tentang sistem informasi manajemen barang dan aset daerah Pemerintah Kota Palopo	2023	Server dan Akses Internet (<i>Bandwith Dedicated</i>)	2023	Integrasi data menggunakan <i>web service</i> (API)	2024	Bimtek Admin OPD	2023	

4.2.2 Rencana Aksi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
B.1 Pariwisata	B.1.1 Peningkatan pelayanan pariwisata Kota Palopo melalui teknologi informasi dan media digital.	B.1.1 P.1 Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan <i>market place</i>)	Aturan penyediaan dan usaha transportasi	2023	Pusat pelayanan dan sarana transportasi	2023	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan <i>market place</i>)	2023	Informasi kemudahan kunjungan wisata, pendidikan, kesehatan,	2023	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
									kota bersejarah		
	B.1.2 Peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	B.1.2 P.1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kabupaten/Kota	Pengembangan aturan penguatan <i>brand</i> daerah	2023	Fasilitas publik penunjang destinasi pariwisata	2023	Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2023	Informasi kemudahan kunjungan wisata	2023	
		B.1.2 P.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pengembangan aturan penguatan <i>brand</i> daerah	2023	Fasilitas publik penunjang destinasi pariwisata	2023	Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2023	Informasi kemudahan kunjungan wisata	2023	
B.2 Manajemen Birokrasi yang Efisien	B.2.1 Peningkatan sistem informasi pelayanan investasi bisnis di Kota Palopo	B.2.1 P.1 Peta potensi dan peluang usaha	Regulasi dokumen kajian tentang potensi dan peluang investasi	2023	Sarana - prasarana pendukung kawasan strategis ekonomi dan data - data sekunder lainnya	2023	Aplikasi, jaringan dan hardware.	2023	Sosialisasi melalui penyebaran sosial media	2023	DPMPTSP
		B.2.1 P.2 Sistem Online Single Submission (OSS)	UUD No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	2022	Server, Akses Internet	2023	Server, Akses Internet	2023	Sosialisasi melalui penyebaran di website dan sosial media	2023	
		B.2.1 P.3 Portal peta investasi strategis Kota Palopo	Regulasi pengelolaan usaha dan investasi	2023	Sarana-prasarana pendukung kawasan strategis ekonomi	2023	Sistem Informasi Potensi Investasi Kota Palopo	2023	Informasi kemudahan investasi usaha	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Regulasi dokumen kajian tentang Sistem Informasi Kerjasama Daerah Kota Palopo (SIKaP)	2024	Pengadaan server untuk mendukung/ hosting aplikasi Sistem Informasi Kerjasama Daerah Kota Palopo (SIKaP)	2024	Aplikasi Sistem Informasi Kerjasama Daerah Kota Palopo (SIKaP)	2024	Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial - Surat Edaran Walikota tentang SIKaP	2024	SETDA (BAGIAN KERJASAMA)
		B.2.1 P.4 Penyediaan aplikasi pariwisata dan ekraf Kota Palopo berbasis website	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.	2022	Sever, Hosting, Nama Domain, Akses Internet	2022	Aplikasi berbasis Web dan Mobile (Android/IOS) / Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2022-2023	Sosialisasi dan Bimtek	2022-2024	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
B.3 Membangun Wajah Kota	B.3.1 Peningkatan aksesibilitas data dan informasi infrastruktur dan fasilitas public bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	B.3.1 P.1 Penyusunan RDTR kawasan cagar budaya	Regulasi kewajiban muatan budaya lokal dalam arsitektur bangunan	2024	RDTR kawasan cagar budaya (kawasan lalebbata)	2024	Dokumen RDTR kawasan cagar budaya (kawasan lalebbata)	2024	sosialisasi RDTR kawasan cagar budaya (kawasan lalebbata)	2024	Dinas PUPR (Bidang Tata Ruang)
		B.3.1 P.2 pelestarian dan pengelolaan cagar budaya - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Forum kawasan Lalebbata (Pelibatan perusahaan, OPD, dan Masyarakat)	2023	Cagar Budaya yang sudah didata dan ditetapkan - Cagar budaya benda, cagar budaya bangunan, cagar budaya struktur, cagar budaya situs, cagar budaya kawasan.	2023	Papan Informasi dan barcode cagar budaya - Berada di Organisasi Perangkat Daerah	2023	Menerbitkan publikasi secara berkala yang membahas tentang cagar budaya	2023	Dinas Kebudayaan

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		B.3.1 P.3 Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten / Kota	Penetapan Kawasan Lalebbata sebagai kota tua / pusaka	2023	Kawasan Kota Pusaka	2023	Aplikasi berbasis Web	2023	Menerbitkan publikasi secara berkala yang membahas tentang cagar budaya	2023	
		B.3.1 P.4 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Forum kawasan Lalebbata (Pelibatan perusahaan, OPD, dan Masyarakat)	2023	Cagar Budaya yang sudah data dan di tetapkan	2023	Papan Informasi dan barcode cagar budaya	2023	Situs/bangun an bersejarah di kawasan lalebbata	2023	
		B.3.1 P.5 Penyebaran Media Informasi Publik melalui Website, Sosmed, Youtube dan Media Online	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.	2022 - 2026	Server, Akses Internet	2022 - 2026	Portal Website Palopokota	2022 - 2026	Publikasi dan branding melalui website dan sosmed	2022 - 2026	Dinas Kominfo

4.2.3 Rencana Aksi Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
E.1 Industri Berdaya Saing	E.1.1 Pengembangan sistem koordinasi	E.1.1 P.1 Pengembangan produk rumput laut	Regulasi usaha pengembangan industri dan kerjasama usaha	2022 - 2026	Industri pengolahan rumput laut	2022 - 2026	Portal informasi dan komunikasi pelaku usaha	2022 - 2026	Pengolahan rumpul laut sebagai produk	2022 - 2026	Dinas Perindustrian

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.		(pengaturan harga dan investasi)						(Kualitas nomor 1 dunia)		
		E.1.1 P.2 Pelestarian ekosistem laut	Forum pengusaha rumput laut dan pengaturan lokasi usaha	2022 - 2026	Sarana prasarana konservasi terumbu karang	2022 - 2026	Portal informasi dan komunikasi kawasan strategis ekonomi	2022 - 2026	Pengambilan dan pengolahan hasil laut	2022 - 2026	
		E.1.1 P.3 Pengembangan dan pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Fasilitasi penerbitan izin usaha industri	2022 - 2026	data IKM	2022 - 2026	Aplikasi Sinas (Sistem Informasi Industri Nasional)	2022 - 2026	Pengumpulan & pengolahan data IKM	2022 - 2026	
	E.1.2 Pengembangan akses data dan informasi investasi guna mendorong perluasan kesempatan berusaha	E.1.2 P.1 Meningkatkan Luas Tanam Tanaman Pangan, Luas Panen	Pengembangan kebijakan peningkatan produk pertanian	2022 - 2026	Alat pengolahan lahan pertanian	2022 - 2026	Sistem informasi pertanian dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi pertanian dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo
		E.1.2 P.2 Penerapan Inovasi Pertanian	Pengembangan kebijakan peningkatan produk pertanian	2022 - 2026	Alat pengolahan hasil pertanian	2022 - 2026	Sistem informasi pertanian dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi pertanian dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	
		E.1.2 P.3 Meningkatkan luas tanam perkebunan, Luas Panen dan mengurangi serangan hama	Pengembangan kebijakan peningkatan produk pertanian	2022 - 2026	Alat pengolahan lahan pertanian	2022 - 2026	Sistem informasi pertanian dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi pertanian dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		E.1.2 P.4 Meningkatkan angka kelahiran dan mengurangi angka kematian ternak	Pengembangan kebijakan peningkatan produk peternakan	2022 - 2026	Alat pengolahan hasil ternak	2022 - 2026	Sistem informasi peternakan dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi peternakan dalam Portal Kota Palopo	2022 - 2026	
		E.1.2 P.5 Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.		Server dan maintenance Aplikasi Dapoparekraf		Aplikasi Dapoparekraf		Sosialisasi pemanfaatan Aplikasi Dapoparekraf		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
E.2 Kesejahteraan Masyarakat	E.2.1 Pengembangan sistem pelayanan peningkatan usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.	E.2.1 P.1 Program Peningkatan pangan, b. Program Peningkatan Produktivitas	Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta peningkatan mutu dan keamanan pangan kawasan hunian dan lingkungan permukiman	2022	a. lumbung pangan, b.rumah bibit (greenhouse)	2023	a. Kelompok Tani, b.Kelompok Tani Wanita (kwt)	2024	Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pangan berbasis sumber daya pangan lokal	2024	Dinas Ketahanan Pangan
		E.2.1 P.2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan aturan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2023	Alat produksi dan kawasan khusus Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2023	Sistem informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam Portal Kota Palopo	2023	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam Portal Kota Palopo	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Sentra UMKM Berbasis Digital / UMKM Palopo Go Digital	Pengembangan aturan pendampingan pemanfaatan teknologi untuk usaha kecil menengah	2023	Pengembangan ruang pelayanan UMKM Palopo Go Digital	2023	Sistem informasi usaha kecil menengah Kota Palopo / UMKM Palopo Go Digital	2023	Panduan pemanfaatan system informasi dan media digital / UMKM Palopo Go Digital	2023	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		E.2.1 P.3 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengembangan aturan standarisasi harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2023	Pasar Tradisional dan Ritel Modern	2023	Sistem informasi Pasar Tradisional dan Ritel Modern dalam Portal Kota Palopo	2023	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi Pasar Tradisional dan Ritel Modern dalam Portal Kota Palopo	2023	Dinas Perdagangan
E.3 Transaksi Keuangan	E.3.1 Peningkatan pelayanan transaksi keuangan, terutama pada bidang administrasi publik, pendidikan,	E.3.1 P.1 Program pengembangan UMKM, Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Penguatan UMKM melalui fasilitasi permodalan dengan mitra Usaha (pihak perbankan melalui KUR dan BUMN melalui CSR)	2022	Taman promosi produk usaha mikro	2023	E-katalog UMKM	2023	Pelatihan & Pendampingan usaha mikro	2023	Dinas Koperasi dan UKM

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	Kesehatan, dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	E.3.1 P.1 Program pengembangan UMKM, Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;	Pembinaan UMKM melalui pelatihan secara kelembagaan & usaha serta pendampingan usaha Penguatan koperasi melalui fasilitasi permodalan dengan mitras Usaha	2022	Taman promosi produk usaha mikro Penyediaan ruang pelayanan pengembangan UMKM dan	2023	E-katalog UMKM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	2023	Pelatihan & Pendampingan usaha mikro Pelatihan & Pendampingan Koperasi	2023 2023	Dinas Koperasi dan UKM
		E.3.1 P.2 Program: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Kegiatan: Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Penguatan Koperasi melalui pelatihan dan pembinaan para pelaku usaha koperasi	2022	Penyediaan ruang pelayanan pengembangan UMKM dan	2023	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	2023	Pelatihan & Pendampingan Koperasi	2023	
		E.3.1 P.3 Program Perekonomian dan Pembangunan: Pengelolaan Layanan	Penyusunan aturan dan lembaga pengembangan standar pelayanan	2023	Pengembangan jaringan informasi dan ruang pelayanan daerah	2023	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	2023	Pengelolaan dan transaksi keuangan elektronik	2023	Dinas Sosial

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Pengadaan Secara Elektronik									

4.2.4 Rencana Aksi Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
L.1 Harmonisasi Lingkungan	L.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	L.1.1 P.1 Pelayanan penanggulangan bencana	Pembentukan forum masyarakat tanggap bencana	2023	Pengadaan perangkat pendukung kebencanaan daerah Pengadaan sarana prasarana pengembangan komunitas tanggap bencana	2023	Sistem informasi kebencanaan daerah Media informasi masyarakat tanggap bencana	2023	Sosialisasi sistem informasi kebencanaan daerah Peningkatan kapasitas SDM lembaga kebencanaan daerah	2023	BPBD
		L.1.1 P.2 Pengadaan Smart Alarm Kota Palopo : untuk antisipasi kebakaran, ditempatkan beberapa titik terkoneksi dengan Pemadam Kebakaran dan hidran air (Berupa Fisik bukan aplikasi)	Perwal terkait kebencanaan	2023	Pengadaan jaringan hidran	2023	Konektivitas sumber kebakaran dengan damkar	2023	Sosialisasi smart alarm Kota Palopo	2023	DAMKAR

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		L.1.1 P.3 Pemenuhan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Pembentukan UPT Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada setiap Kecamatan	2022	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung di Kecamatan	2023	Sistem Informasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	2023	Peningkatan SDM melalui Pelatihan Dasar	2023	SATPOL PP
	L.1.2 Pembentukan sistem koordinasi pengembangan penataan ruang daerah kumuh	L.1.2 P.1 Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan Landasan Hukum untuk pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Perumahan	2023	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan	2023	Sistem Listrik Pintar dan Sistem Air Pintar	2025	Monitoring dan Evaluasi Penghunian Perumahan	2023-2016	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
		L.1.2 P.2 Program Kawasan Permukiman	Penyusunan Landasan Hukum untuk pelaksanaan program kegiatan Kawasan Permukiman	2023	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	2023	Sistem Informasi RTLH dan Data Backlok terintegrasi	2023	Pengembangan Sistem Informasi RTLH dan Data Backlok terintegrasi	2023-2025	
		L.1.2 P.3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penyusunan Landasan Hukum untuk pelaksanaan program kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2023	Media pelayanan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2023	Sistem informasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2023	Pengembangan Sistem Informasi RTLH dan Data Backlok terintegrasi	2023-2025	
		L.1.2 P.4 Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Persiapan SDM	2023	Alat Pemeriksaan dan bahan pemeriksaan	2023	SK pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Fasyankes	2023	Sosialisasi dan advokasi ke penyedia tempat layanan dan aparat pemerintah wilayah	2023	Dinas Kesehatan
L.2 Pelayanan Kesehatan	L.2.1 Peningkatan akses data dan informasi kesehatan	L.2.1 P.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Sebagai RS Kelas B, RSUD Sawerigading Kota Palopo harus menyediakan Pelayanan sesuai dengan standar dan	2023	Perangkat Penunjang dan Layanan Rawat Jalan	2023	Antrian Online (SIMPONI CERIA)	2023	Sosialisasi dan Promosi Kesehatan	2023	RSUD Sawerigading

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Daerah Kabupaten/ Kota	mengutamakan keselamatan pasien								S
		L.2.1 P.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sawerigading Kota Palopo harus meningkatkan Akreditasi yang telah diperoleh dari Akreditasi Madya Ke Paripurna Masyarakat	2023	Perangkat Penunjang dan Layanan Rawat Jalan	2023	Antrian Online (SIMPONI CERIA)	2023	Sosialisasi dan Promosi Kesehatan	2023	
	L.2.2 Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sistem koordinasi pelayanan kesehatan daerah	L.2.2 P.1 Pembuatan Sistem Informasi layanan Kesehatan dan Rumah Sakit Terintegrasi (e-Healthcare)	Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan dan rumah sakit terintegrasi	2023	Maintenance Server, Jaringan Intranet, Database Aplikasi (e-Healthcare)	2023	Sistem Informasi layanan Kesehatan dan Rumah Sakit Terintegrasi (e-Healthcare)	2023	Panduan pemanfaatan Sistem Informasi layanan Kesehatan dan Rumah Sakit Terintegrasi (e-Healthcare)	2023	
L.3 Sarana Transportasi	L.3.1 Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan penunjang peningkatan angka kunjungan Kota Palopo	L.3.1. P.1 Pembangunan/Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Ruas	Pengembangan pariwisata	2023	Talud pengaman jalan	2023	Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	Dinas Pekerjaan Umum
		L.3.1. P.2 Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Pengembangan Kawasan industri	2023	Talud pengaman jalan	2023	Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		L.3.1. P.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Kebijakan peningkatan fasilitas Jalan Kota	2023	Pemeliharaan jalan	2023	Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	
		L.3.1. P.4 Pengadaan dan Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS)	Kebijakan peningkatan fasilitas Jalan Kota	2023	Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS)	2023	Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	Sosialisasi pemanfaatan Sistem informasi fasilitas jalan Kota Palopo (Portal Kota Palopo)	2023	Dinas Perhubungan

4.2.5 Rencana Aksi Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Peningkatan akses data dan informasi kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	S.1.1 P.1 Program Pemberdayaan Sosial	Penyusunan peraturan pengembangan program perlindungan kelompok rentan	2023	Ruang pelayanan pelaporan dan pengembangan program untuk kelompok rentan	2023	Database dan portal informasi masyarakat kelompok rentan	2023	Panduan pemberdayaan pada kelompok rentan	2022	Dinas Sosial
		S.1.1 P.2 Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Penyusunan peraturan pengembangan program perlindungan kelompok rentan	2023	Ruang pelayanan pelaporan dan pengembangan program untuk kelompok rentan	2023	Database dan portal informasi masyarakat kelompok rentan	2023	Panduan pemberdayaan pada kelompok rentan (peran gender)		

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		S.1.1 P.3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyusunan peraturan pengembangan program perlindungan kelompok rentan	2023	Ruang pelayanan pelaporan dan pengembangan program untuk kelompok rentan	2023	Database dan portal informasi masyarakat kelompok rentan	2023	Panduan pemberdayaan pada kelompok rentan (peran keluarga)		
		S.1.1 P.4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Pemerintahan No. 87 Tahun 2014	2022	Alat Obat Kontrasepsi	2022	Aplikasi New SIGA	2023	Penyuluhan dan Bimbingan Pasangan Usia Subur	2023	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
		S.1.1 P.5 Percepatan Penurunan STUNTING	Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2021	2022	Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko STUNTING	2022	Aplikasi ELSIMIL	2023	Orientasi Pendampingan Keluarga	2023	
		S.1.1 P.6 Pelayanan antar kerja di daerah Kota Palopo	Aturan standar pelayanan berbasis teknologi informasi	2023	Pengadaan Web	2023	Aplikasi berbasis website	2023	Pemanfaatan aplikasi pencarian kerja	2023	Dinas Tenaga Kerja
		S.1.1 P.7 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Peningkatan Pemahaman Kasus Hubungan Industrial	2023	Pengadaan ruang khusus pelayanan informasi industri	2023	Sistem informasi kawasan industri Kota Palopo	2023	Sosialisasi pemanfaatan sistem informasi kawasan industri Kota Palopo	2023	Dinas Perindustrian
		S.1.1 P.8 Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Edukasi Masyarakat Pengembangan Taman Edukasi Pengembangan Museum Kota	Penyusunan peraturan daerah tentang pengembangan destinasi wisata edukatif	2023	1.Bangunan Taman Edukasi 2.Bangunan Museum Kota	2023	Sistem informasi taman edukasi dan museum kota	2023	Peningkatan literasi ruang edukasi masyarakat Peningkatan kualitas SDM bidang pelayanan dan pengelolaan taman	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
									edukasi dan museum kota		
		S.1.1 P.9 Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Pembentukan REDKAR di setiap kelurahan	2023	Posko REDKAR di setiap kelurahan	2024	Pemanfaatan Aplikasi REDKAR	2024	Peningkatan kapasitas REDKAR	2024	DAMKAR
S.2 Membangun Eskosistem Edukasi / Pendidikan	S.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	S.2.1 P.1 Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan)	Penyusunan peraturan tentang pengembangan mutu dan kualitas PTK	2023	Ruang kelas di sekolah, RTH, Ruang Publik	2023	Pengembangan sistem aplikasi kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Guru	2023	Pendayagunaan Akun belajar.id dan Keterlibatan Guru Penggerak	2023	Dinas Pendidikan
		S.2.1 P.2 Pengembangan layanan digitalisasi pendidikan (e-education)	Pengembangan aturan system pembelajaran berbasis digital	2023	Ruang layanan digitalisasi pendidikan	2023	Sistem informasi pelayanan digitalisasi pendidikan	2023	Panduan pemanfaatn sistem Informasi pelayanan digitalisasi pendidikan	2023	Dinas Pendidikan
		S.2.1 P.3 Pembuatan Sistem Informasi Pelatihan dan Lowongan Kerja (SIPLOKER)	Pengembangan kebijakan kerjasama lembaga pendidikan dan industri	2023	Maintenance Server, Jaringan Intranet, Database Aplikasi SIPLOKER	2023	Sistem Informasi Pelatihan dan Lowongan Kerja	2023	Panduan pemanfaatn sistem Informasi Pelatihan dan Lowongan Kerja SIPLOKER	2023	Dinas Tenaga Kerja
S.2 Menjamin Keselamatan Masyarakat	S.3.1 Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan	S.3.1 P.1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat: kegiatan pengelolaan jaminan	Peraturan pemenuhan Kesehatan untuk masyarakat	2023	ada mou dengan dinas capil aplikasi data kependudukan bisa diakses oleh dinas kesehatan)	2023	aplikasi SI CAKEP	2023	sosialisasi ke masyarakat tentang kemudahan pendaftaran bpjs pemda (kantor lurah, puskesmas, dan terkait	2023	Dinas Kesehatan

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	teknologi informasi dan media digital	kesehatan jaminan masyarakat							(setiap kegiatan di sosialisasikan)		
		S.3.1 P.2 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peraturan peningkatan pelayanan kepesertaan ber-KB	2023	gudang khusus alat kontrasepsi, kendaraan operasional untuk pelayanan kb	2023	aplikasi barang (keluar masuknya alat kontrasepsi)	2023	sosialisasi di kecamatan minimal setahun sekali	2023	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		S.3.1 P.3 Program Rehabilitasi Sosial	Peraturan perlindungan sosial masyarakat	2023	Pengembangan ruang pusat informasi dan pelayanan sosial satu pintu	2023	Portal informasi pelayanan sosial	2023	Panduan pelayanan dan perlindungan sosial	2023	
		S.3.1 P.4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Peraturan perlindungan sosial masyarakat	2023	Pengembangan ruang pusat informasi dan pelayanan sosial satu pintu	2023	Portal informasi pelayanan sosial	2023	Panduan pelayanan dan perlindungan sosial	2023	
		S.3.1 P.5 semua pustu yang ada di palopo dijadikan tempat posyandu dengan sistem lima meja	tidak merubah jadwal posyandu yang sudah ada	2023	pustu jam kerja (07.00-16.00)	2023	petugas pustu	2023	swiping RT/RW setiap jadwal posyandu	2023	DINAS SOSIAL
		S.3.1 P.6 Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencapaian target SPM	2023	Pembangunan Gedung/Kantor	2023	Perangkat Komunikasi	2023	Peningkatan SDM dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2023	DAMKAR
		S.3.1 P.7 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan	Penyediaan air baku pemadam	2023	Pengadaan Rumah Pompa hydrant dan alarm	2024	Jaringan Proteksi	2025	Peningkatan pengelolaan jaringan	2026	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		kebakaran dan alat pelindung diri yang dibiayai							proteksi hydrant dan alarm		

4.2.6 Rencana Aksi Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
E.1 Pelindungan Lingkungan Hidup	E.1.1 Pengembangan sistem koordinasi pengawasan dan evaluasi perlindungan lingkungan Kota Palopo	E.1.1 P.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembentukan petugas pengelola RTH / taman kota palopo	2023	Pemeliharaan prasarana taman kota	2023	Pembuatan aplikasi (Sistem informasi) taman kota Palopo	2023	Peningkatan kualitas SDM pengelola taman kota	2023	Dinas Lingkungan Hidup
		E.1.1 P.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan penanganan lahan kritis	Pembentukan Forum Peduli Sungai	2023	Proteksi DAS dan Normalisasi Sungai	2023	Pembuatan Aplikasi kondisi DAS	2023	Pengelolaan dan pemanfaatan air	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		E.1.1 P.3 Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perda RTRW dan RDTR; Pembentukan Petugas Pengelolah Drainase	2023	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau; Pembangunan Drainase	2023	Aplikasi Simtaru	2023	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Aplikasi Simtaru	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		E.1.1 P.4 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kota Palopo	Pembentukan Regulasi RP2KPKPK	2023	Ketersediaan Data RTLH	2023	Pembuatan Aplikasi e-rtlh palopo	2023	Peningkatan Kapasitas SDM untuk Peningkatan Validitas Data RTLH	2023	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		E.1.1 P.5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembentukan Pokja dan Forum PKP	2023	Data Baseline Kumuh	2023	Aplikasi Baseline Kumuh	2023	Peningkatan Pemahaman dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Kumuh	2023	
		E.1.1 P.6 Pemasangan rambu lalu lintas (prioritas pada daerah rawan longsor serta daerah rawan kecelakaan)	- Peraturan Walikota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pembentukan Forum LLAJ Kota Palopo	2023	Data inventarisasi perlengkapan jalan	2023	ATCS/ Area Traffic Control System (Program Jangka Menengah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan)	2026	Peningkatan SDM pegawai serta sosialisasi menggunakan sosial media kepada masyarakat terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Kota Palopo	2023	Dinas Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
E.2 Pengelolaan Limbah dan Sampah	E.2.1 Pengembangan sistem informasi dan aksesibilitas pengelolaan sampah dan limbah Kota Palopo	E.2.1 P.1 Pembuatan sistem Informasi Bank Sampah "Mapaccing Toda"	Peraturan pemanfaatan media digital dalam penanganan dan pengelolaan sampah	2023	Maintenance Server, Jaringan Intranet, Database Aplikasi	2023	Sistem Informasi Bank Sampah "Mapaccing Toda"	2023	Panduan pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam pengelolaan sampah	2023	Dinas Lingkungan Hidup
		E.2.1 P.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembuatan Peraturan Walikota Pegelolaan IPLT	2023	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)		Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)		Pelatihan SDM Pengelolah IPLT		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		E.2.1 P.3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengkajian Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah di Kota Palopo; Perwal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi kota palopo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2023	1. Pengadaan bangunan/gudang penyimpanan sampah terkelola 2. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah (motor sampah, alat timbang, dll)	2023	Pembuatan Aplikasi Bank Sampah Kota Palopo	2023	Pelatihan SDM pengelola Bank Sampah	2023	Dinas Lingkungan Hidup
E.3 Tata Kelola Energi	E.3.1 Optimalisasi sarana prasarana tata kelola energi pada fasilitas publik	E.3.1 P.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Peraturan penggunaan listrik daerah dan teknologi ramah lingkungan	2023	Pengadaan Prasarana lampu jalan yang berbasis pengontrolan	2023	Pembuatan Aplikasi penerangan jalan umum (PJU)	2023	Pelatihan SDM pengelola data dan pemelihara lampu jalan	2023	UPTD PJU

Rencana Progrm Jangka Pendek Tahun 2023

BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

5.1 Peta Jalan Jangka Pendek (2023)

5.5.1 Peta Jalan Smart Government

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Layanan Publik	Pengembangan pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan media digital dan peningkatan aksesibilitas data dan informasi melalui pengembangan sistem pengelolaan data terpusat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Kependudukan Yang Berfungsi Baik	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	1 Sistem	237.000.000	APBD	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Pengembangan sistem pengawasan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase jumlah Temuan dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi E-Audit	90	-	APBD	Inspektorat
		Kegiatan Evaluasi dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Daftar Temuan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI) yang ditindaklanjuti	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		82	-	APBD	Inspektorat
	Pengembangan sistem koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah.	1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi e-sakip kota palopo	49 Dokumen	214.976.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Lakip Perangkat Daerah	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		49 Dokumen	102.957.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
Efisiensi Kebijakan Publik	Pengembangan sistem koordinasi perancangan kebijakan pemerintah daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	Aplikasi e-LPDD kota palopo	3 Laporan	137.199.700	APBD	Sekda Bagian Tata Pemerintahan

5.5.2 Peta Jalan Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Pariwisata	Peningkatan pelayanan pariwisata Kota Palopo melalui teknologi informasi dan media digital.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/Keg. Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Dokumen, 1 Kegiatan	57.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Parekraf Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Destinasi Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	-	-	APBD	
	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Pariwisata yang dlbina	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	10 Kelompok Usaha	Rp. 16.000.000	APBD	
Kemudahan Pelayanan Bisnis	Peningkatan sistem informasi pelayanan investasi bisnis di Kota Palopo	Penyediaan peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen petapotensi dan peluang usaha	-	Aplikasi/Portal Peta Investasi	2 Kecamatan	45.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama antar Daerah Lingkup Dalam Negeri	-	Portal Informasi Potensi Daerah dan Potensi Kerjasama Kota Palopo	-	-	APBD	Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama
		Aplikasi berbasis web sebagai market place pariwisata	Aplikasi Pariwisata Palopo yang dimanfaatkan sebagai market place	-	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Unit	50.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Membangun Wajah Kota	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi infrastruktur dan fasilitas public bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	-	Portal Informasi Kota Lalebatta / Kota Pusaka	5 Kegiatan	83.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo

5.5.2 Peta Jalan Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Industri Berdaya Saing	Pengembangan sistem koordinasi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang tumbuh	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Portal Informasi Kawasan Strategis Industri Kota Palopo	443	116.194.000	APBD	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	7%	1.436.329.550	APBD	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya			54%	573.576.675	APBD	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin			20%	38.000.000	APBD	
	Pengembangan akses data dan informasi investasi guna mendorong perluasan kesempatan berusaha	Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses layanan internet	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Aplikasi Dapoparekraf	-	-	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan sistem pelayanan peningkatan usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	112,48 ton	68.285.500	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)		E akatalog UMKM	28 %	643.266.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar (%)	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	26,92 %	33.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Transaksi Keuangan	Peningkatan pelayanan transaksi keuangan, terutama pada bidang administrasi publik, pendidikan, Kesehatan, dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah (Jumlah Paket Sistem Informasi E-procument yang dikelola)	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	E akatalog UMKM	4 laporan	199.716.500	APBD	Dinas Perdagangan

	Pengoptimalan Kualitas Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang aktif	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	65 Koperasi	10.865.000	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
		Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	E akatalog UMKM	200 UMK	232.152.000	APBD	

5.5.3 Peta Jalan Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	100	103.297.450	APBD dan APBD Propinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	98,5	2.850.000.000		
	Pembentukan sistem koordinasi pengembangan penataan ruang daerah kumuh	Keg. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	98,5	2.688.600.000		
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses data dan informasi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	122.333.750	DAK	Dinas Kesehatan
		Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Jumlah masyarakat yang diperiksa ditempat umum	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	31.632.525	APBD	

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Umum Pemerintah Daerah	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	12 Laporan	31.632.525	APBD	
Peningkatan pelayanan Kesehatan melalui pengembangan sistem koordinasi pelayanan kesehatan daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	122.333.750.000		RSUD SAWERIGA DING PALOPO
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	3 jenis	29.611.750.000		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	22 Layanan	92.722.000.000		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	31.632.525.000		
Sarana Transportasi	Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan penunjang peningkatan angka kunjungan Kota Palopo	Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Panjang jalan yang ditangani	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 500 km)	3.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Presentase jalan Kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100 % (Panjang 1 km)	250.000.000	APBD	
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	-		Portal Informasi Dinas Perhubungan	99%	3.320.250.625	APBD

5.5.4 Peta Jalan Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Portal informasi Dinas Sosial	65%	250.000.000	APBD	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Jumlah Sistem Data Gender Dan Anak Yang Berfungsi Baik	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Aplikasi Sistem Data Gender	95%	203.100.000	APBD	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Database anak terlantar dan kurang mampu	95%	203.100.000	APBD	Dinas Sosial
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	-	REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran)	600 Org	155.000.000	APBD	
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Akseptor Kb	-	Mempermudah Pencaker Memperoleh Informasi Pekerjaan dan Bagi Pemberi Kerja Dapat Langsung Mengetahui Calon Pekerja	3 Kegiatan	175.000.000	APBD	Dinas Sosial
Membangun Eskosistem Edukasi/ Pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Rasio Ideal Guru Dan Siswa	16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.	Memberikan edukasi melalui penyuluhan KB dan optimalisasi layanan aplikasi NEW SIGA dan ELSIMIL	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Jumlah Ptk Dan Kualitas Ptk	-	Pemanfaatan Sumberdaya, Keahlian, Kreatiifitas, dan Inovasi untuk mengembangkan lingkungan belajar	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
	Peningkatan pelayanan keamanan masyarakat melalui	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas,	-	Portal Informasi Dinas Sosial	100%	350.000.000	APBD	Dinas Sosial

Menjamin Keselamatan Masyarakat	pemanfaatan teknologi informasi dan media digital		Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti						
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga /Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial(%)	-	Portal Informasi Dinas Sosial	56	5.533.625.065	APBD	Dinas Sosial

5.5.5 Peta Jalan Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Pelindungan Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem koordinasi pengawasan dan evaluasi perlindungan lingkungan Kota Palopo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditangani	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Sungai	70 Ha	312.900.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya;	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, Pembentukan Forum Ruang Terbuka Hijau	20%	104.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Drainase	11 %	383.700.000	APBD	
Pengelolaan Limbah dan Sampah	Pengembangan sistem informasi dan aksesibilitas pengelolaan sampah dan limbah Kota Palopo	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	1. Pengurangan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse, Ricycle) dari sumbernya	9 Kelompok	30.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Tata Kelola Energi	Optimalisasi sarana prasarana tata kelola energi pada fasilitas publik	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Jumlah lampu jalan yang dikontrol otomatis dan dikontrol melalui smartphone	7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.	1. Aplikasi pengontrolan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) 2. Pengontrolan cahaya dan intensitas lampu jalan	150 Unit	30.000.0000	APBD	UPTD PJU

Rencana Progrm Jangka Menengah Tahun 2024 - 2027

5.2 Peta Jalan Jangka Menengah (2024-2027)

5.2.1 Peta Jalan Smart Government

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Kependudukan Yang Berfungsi Baik	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	1 Sistem	237.000.000	1 Sistem	244.000.000	1 Sistem	250.000.000	1 Sistem	282.000.000	APBD	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern oleh seluruh perangkat daerah melalui asistensi / pendampingan oleh Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase jumlah Temuan dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi E-Audit	90	220.000.000	90	225.000.000	90	220.000.000	90	220.000.000	APBD	Inspektoral
		Kegiatan Evaluasi dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Daftar Temuan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI) yang ditindaklanjuti	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		82	195.000.000	82	200.000.000	82	195.000.000	82	195.000.000	APBD	Inspektoral
	Optimalisasi dan Integrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi e-sakip kota palopo	49	225.980.000	49	234.000.000	49	240.000.000	49	272.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Lakip Perangkat Daerah	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		49	118.186.570	49	124.000.000	49	130.000.000	49	152.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
Efisiensi Kebijakan Publik	Optimalisasi dan Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Aplikasi e-LPDD kota palopo	3	137.199.700	3	144.000.000	3	150.000.000	3	172.000.000	APBD	Sekda Bagian Tata Pemerintahan

5.2.2 Peta Jalan Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Pariwisata	Peningkatan pelayanan pariwisata Kota Palopo melalui teknologi informasi dan media digital.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/Keg. Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Parekraf Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Destinasi Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	5 Kegiatan	65.000.000	5 Kegiatan	70.000.000	5 Kegiatan	75.000.000	5 Kegiatan	80.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Pariwisata yang dlbina	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	15 Kelompok	25.000.000	17 Kelompok	28.000.000	20 Kelompok	32.000.000	20 Kelompok	36.000.000	APBD	
Kemudahan Pelayanan Bisnis	Peningkatan sistem informasi pelayanan investasi bisnis di Kota Palopo	Penyediaan peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen petapotensi dan peluang usaha	-	Aplikasi/Portal Peta Investasi	2 Kecamatan	55.000.000	2 Kecamatan	65.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama antar Daerah Lingkup Dalam Negeri	-	Portal Informasi Potensi Daerah dan Potensi Kerjasama Kota Palopo	1 (Satu) Kegiatan	100.000.000,-	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	APBD	Bagian Kerjasama Sekertariat Daerah
		Aplikasi berbasis web sebagai market place pariwisata	Aplikasi Pariwisata Palopo yang dimanfaatkan sebagai market place	-	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1Unit Operasi	6.000.000	1Unit Operasi	6.000.000	1Unit Operasi	6.000.000	1Unit Operasi	6.000.000	6.000.000	APBD

						onal		sional		sional		sional			
Membran Wajah Kota	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi infrastruktur dan fasilitas public bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	-	Portal Informasi Kota Lalebatta / Kota Pusaka	7 Kegiatan	87.000.000	8 Kegiatan	90.000.000	9 Kegiatan	92.000.000		96.000.000	APBD	Dinas Kebudayaan

5.2.3 Peta Jalan Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Industri Berdaya Saing	Pengembangan sistem koordinasi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang tumbuh	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Portal Informasi Kawasan Strategis Industri Kota Palopo	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	APBD	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	E akatalog UMKM	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	APBD	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	55%	587.916.092	60%	595.916.092	60%	601.916.092	80%	687.916.092	APBD	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	25%	38.950.000	50%	68.950.000	75%	130.950.000	75%	135.950.000	APBD	
	Pengembangan akses data dan informasi investasi guna mendorong	Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Aplikasi Dapoparekraf	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	APBD	

	perluasan kesempatan berusaha		akses layanan internet												
Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan sistem pelayanan peningkatan usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E katalog UMKM	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	-	E katalog UMKM	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar (%)	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E katalog UMKM	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Transaksi Keuangan	Peningkatan pelayanan transaksi keuangan, terutama pada bidang administrasi publik, pendidikan, Kesehatan, dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital Penguoptimalan Kualitas Koperasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah (Jumlah Paket Sistem Informasi E-procurement yang dikelola)	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	E katalog UMKM	4 laporan	202.590.800	4 laporan	207.050.800	4 laporan	212.100.800	4 laporan	220.590.800	APBD	Dinas Perdagangan
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang aktif	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	70 Koperasi	20.000.000	73 Koperasi	20.000.000	75 Koperasi	20.000.000	75 Koperasi	20.000.000	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
		Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari	E katalog UMKM	200UMK	307.281.250	200UMK	353.603.438	200UMK	406.643.954	200UMK	415.643.954	APBD	

			pendapatan sumber sendiri.											
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2.4 Peta Jalan Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	100	450.000.000	100	600.000.000	100	450.000.000	100	250.000.000	APBD dan APBD Propinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	98,5	2.850.000.000	98,7	2.850.000.000	98,9	2.850.000.000	98,9	2.850.000.000	APBD dan APBN	
		Pembentukan sistem koordinasi pengembangan penataan ruang daerah kumuh	Keg. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	418,26	2.688.600.000	486,9	2.900.300.000	556,9	3.300.000.000	556,9	3.300.000.000	
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses data dan informasi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLU D	Dinas Kesehatan
		Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Jumlah masyarakat yang diperiksa ditempat umum	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000		

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Umum Pemerintah Daerah	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	
Peningkatan pelayanan Kesehatan melalui pengembangan sistem koordinasi pelayanan kesehatan daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	31.632.525.000	100%	33.620.525.000	100%	33.620.525.000	100%	33.620.525.000	100%	35.160.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
Sarana Transportasi	Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan penunjang peningkatan angka kunjungan Kota Palopo	Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Panjang jalan yang ditangani	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 5,57 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Presentase jalan Kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	100% (Panjang 1 km)	253.000.000	100% (Panjang 1 km)	256.000.000	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	

			dapat diakses publik.			km)		km)		km)				
	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	-	Portal Informasi Dinas Perhubungan	99%	3.320.250.625	99%	3.325.250.625	99%	3.330.500.625	99%	3.320.250.625	APBD	Satpol PP

5.2.5 Peta Jalan Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Portal informasi Dinas Sosial	65%	250.000.000	85%	274.000.000	85%	280.000.000	65%	250.000.000	APBD	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Jumlah Sistem Data Gender Dan Anak Yang Berfungsi Baik	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Aplikasi Sistem Data Gender	95%	205.100.000	95%	207.100.000	95%	210.100.000	95%	215.100.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Database anak terlantar dan kurang mampu	95%	205.100.000	95%	207.100.000	95%	210.100.000	95%	215.100.000	APBD	Perempuan dan Perlindungan Anak

		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	-	Portal Dinas Tenaga Kerja	700 Org	158.000.000	800 Org	165.000.000	850 Org	200.000.000	850 Org	200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Akseptor Kb	-	Memperluas Pencaker Memperoleh Informasi Pekerjaan dan Bagi Pemberi Kerja Dapat Langsung Mengetahui Calon Pekerja	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Membangun Eskosistem Edukasi/Pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Rasio Ideal Guru Dan Siswa	16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.	Memberikan edukasi melalui penyuluhan KB dan optimalisasi layanan aplikasi NEW SIGA dan ELSIMIL	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	265.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Jumlah Ptk Dan Kualitas Ptk	-	Pemanfaatan Sumberdaya, Keahlian, Kreatiifitas, dan Inovasi untuk mengembangkan lingkungan belajar	10 0%	65.528.532	10 0%	65.528.532	10 0%	65.528.532	10 0%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan keamanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	-	Portal Informasi Dinas Sosial	10 %	350.000.000	35 %	350.000.000	50 %	350.000.000	80 %	350.000.000	APBD	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga /Keluarga Miskin Yang Mendapatkan	-	Portal Informasi Dinas Sosial	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	APBD	Dinas Sosial

		Perlindungan Dan Jaminan Sosial(%)													
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2.6 Peta Jalan Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Pelindungan Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem koordinasi pengawasan dan evaluasi perlindungan lingkungan Kota Palopo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditangani	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Portal Dinas Lingkungan Hidup	70 Ha	312.900.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya;	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, Pembentukan Forum Ruang Terbuka Hijau	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Drainase	10 %	383.700.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Limbah dan Sampah	Pengembangan sistem informasi dan aksesibilitas pengelolaan sampah dan limbah Kota Palopo	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	1. Pengurangan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse, Ricycle) dari sumbernya	20 %	150.000.000	25 %	100.000.000	25 %	50.000.000	25 %	50.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Penataan Ruang)
Tata Kelola Energi	Optimalisasi sarana prasarana tata kelola energi pada fasilitas publik	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Jumlah lampu jalan yang dikontrol otomatis dan dikontrol melalui smartphone	7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen	1. Aplikasi pengontrolan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum)	150 unit	30.000.000	200 unit	45.000.000	200 unit	45.000.000	150 unit	30.000.000	APBD	UPTD PJU

				kinerja cahaya/lampu.	2. Pengontrolan cahaya dan intensitas lampu jalan												
--	--	--	--	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rencana Progrm Jangka Panjang Tahun 2028 - 2032

5.3 Peta Jalan Jangka Panjang (2028-2032)

5.3.1 Peta Jalan Smart Government

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Layanan Publik	Pengembangan pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan media digital dan peningkatan aksesibilitas data dan informasi melalui pengembangan sistem pengelolaan data terpusat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Kependudukan Yang Berfungsi Baik	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	1 Sistem	237.000.000	1 Sistem	237.000.000	1 Sistem	244.000.000	1 Sistem	250.000.000	1 Sistem	282.000.000	APBD	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Pengembangan sistem pengawasan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase jumlah Temuan dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi E-Audit	90	220.000.000	90	220.000.000	90	225.000.000	90	220.000.000	90	220.000.000	APBD	Inspektoral
		Kegiatan Evaluasi dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Daftar Temuan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI) yang ditindaklanjuti	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		82	195.000.000	82	195.000.000	82	200.000.000	82	195.000.000	82	195.000.000	APBD	Inspektoral
	Pengembangan sistem koordinasi pelaksanaan	1.Peningkatan Kinerja dan	Jumlah dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur	Aplikasi e-sakip kota palopo	49 Do ku	225.980.000	49 Do ku	225.980.000	49 Do ku	234.000.000	49 Do ku	240.000.000	49 Do ku	272.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi

	program pemerintah daerah.	Reformasi Birokrasi		teknologi informasi kota	men		men		men		men		men			
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Lakip Perangkat Daerah	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	49 Dokumen	118.186.570	49 Dokumen	118.186.570	49 Dokumen	124.000.000	49 Dokumen	130.000.000	49 Dokumen	152.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
Efisiensi Kebijakan Publik	Pengembangan sistem koordinasi perancangan kebijakan pemerintah daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Aplikasi e-LPDD kota palopo	3 Laporan	137.199.700	3 Laporan	137.199.700	3 Laporan	144.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	172.000.000	APBD	Sekda Bagian Tata Pemerintahan

5.3.2 Peta Jalan Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Pariwisata	Peningkatan pelayanan pariwisata Kota Palopo melalui teknologi informasi dan media digital.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/Keg. Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Parekrif Kota Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Destinasi Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	5 Kegiatan	65.000.000	5 Kegiatan	65.000.000	5 Kegiatan	70.000.000	5 Kegiatan	75.000.000	5 Kegiatan	80.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Kelompok Usaha Pariwisata yang dbina	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	15 Kelompok	25.000.000	15 Kelompok	25.000.000	17 Kelompok	28.000.000	20 Kelompok	32.000.000	20 Kelompok	36.000.000	APBD	

	Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo	n Destnasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				po k											
Kemudahan Pelayanan Bisnis	Peningkatan sistem informasi pelayanan investasi bisnis di Kota Palopo	Penyediaan peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen petapotensi dan peluang usaha	-	Aplikasi/ Portal Peta Investasi	2 Kecamatan	55.000.000	2 Kecamatan	55.000.000	2 Kecamatan	65.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama antar Daerah Dalam Negeri	-	Portal Informasi Potensi Daerah dan Potensi Kerjasama Kota Palopo	1 (Satu) Kegiatan	100.000.000,-	1 (Satu) Kegiatan	100.000.000,-	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	APBD	Bagian Kerjasama Sekertariat Daerah
		Aplikasi berbasis web sebagai market place pariwisata	Aplikasi Pariwisata Palopo yang dimanfaatkan sebagai market place	-	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	6.000.000	APBD
Membangun Wajah Kota	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi infrastruktur dan fasilitas public bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	-	Portal Informasi Kota Lalebatta / Kota Pusaka	7 Kegiatan	87.000.000	7 Kegiatan	87.000.000	8 Kegiatan	90.000.000	9 Kegiatan	92.000.000		96.000.000	APBD	Dinas Kebudayaan

unggulan Kota Palopo																	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.3.3 Peta Jalan Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Industri Berdaya Saing	Pengembangan sistem koordinasi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang tumbuh	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Portal Informasi Kawasan Strategis Industri Kota Palopo	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	APBD	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	E akatalog UMKM	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	APBD	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	55%	587.916.092	55%	587.916.092	60%	595.916.092	60%	601.916.092	80%	687.916.092	APBD	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	25%	38.950.000	25%	38.950.000	50%	68.950.000	75%	130.950.000	75%	135.950.000	APBD	
	Pengembangan akses data dan informasi investasi guna mendorong perluasan kesempatan berusaha	Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan	Jumlah pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses layanan internet	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Aplikasi Dapopare kraf	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	APBD	

		ekonomi kreatif															
Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan sistem pelayanan peningkatan usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	113,38 ton	69.992.638	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)		E akatalog UMKM	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar (%)	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	30,76%	40.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Transaksi Keuangan	Peningkatan pelayanan transaksi keuangan, terutama pada bidang administrasi publik, pendidikan, Kesehatan, dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah (Jumlah Paket Sistem Informasi E-procument yang dikelola)	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	E akatalog UMKM	4 laporan	202.590.800	4 laporan	202.590.800	4 laporan	207.050.800	4 laporan	212.100.800	4 laporan	220.590.800	APBD	Dinas Perdagangan
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang aktif	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	70 Koperasi	20.000.000	70 Koperasi	20.000.000	73 Koperasi	20.000.000	75 Koperasi	20.000.000	75 Koperasi	20.000.000	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
		Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang	E akatalog UMKM	200U	307.281.250	200	307.281.250	200	353.603.438	200	406.643.954	200	415.643.954	APBD	

		yang meningkat menjadi Usaha Kecil	dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.		M K		U MK		U MK		U MK		U MK			
--	--	------------------------------------	---	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

5.3.4 Peta Jalan Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector		
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031			TK	Angg. 2032
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	100	450.000.000	100	450.000.000	100	600.000.000	100	450.000.000	100	250.000.000	APBD dan APBD Propinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	98,5	2.850.000.00	98,5	2.850.000.00	98,7	2.850.000.00	98,9	2.850.000.00	98,9	2.850.000.00	APBD dan APBN	
		Keg. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	418,26	2.688.600.00	418,26	2.688.600.00	486,9	2.900.300.00	556,9	3.300.000.00	556,9	3.300.000.00	APBD dan APBN	
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses data dan informasi kesehatan melalui pemanfaatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLUD	Dinas Kesehatan

teknologi informasi dan media digital	Kesehatan Masyarakat		penyedia layanan kesehatan.														
	Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Jumlah masyarakat yang diperiksa ditempat umum	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Umum Pemerintah Daerah	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	12 Laporan	31.632.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	
Peningkatan pelayanan Kesehatan melalui pengembangan sistem koordinasi pelayanan kesehatan daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	3 jenis	29.611.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	22 Layanan	92.722.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	33.620.525.000	100%	33.620.525.000	100%	35.160.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO	

		Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota															
Sarana Transportasi	Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan penunjang peningkatan angka kunjungan Kota Palopo	Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Panjang jalan yang ditangani	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Presentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	100% (Panjang 1 km)	253.000.000	100% (Panjang 1 km)	256.000.000	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perdata dan Perkada	-	Portal Informasi Dinas Perhubungan	99%	3.320.250.625	99%	3.320.250.625	99%	3.325.250.625	99%	3.330.500.625	99%	3.320.250.625	APBD	Satpol PP

5.3.5 Peta Jalan Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector		
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031			TK	Angg. 2032
Interaksi Masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara	Portal informasi Dinas Sosial	65%	250.000.000	65%	250.000.000	85%	274.000.000	85%	280.000.000	65%	250.000.000	APBD	Dinas Sosial

	informasi dan media digital			dengan kebutuhan khusus.													
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Jumlah Sistem Data Gender Dan Anak Yang Berfungsi Baik	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Aplikasi Sistem Data Gender	95 %	205.100.000	95 %	205.100.000	95 %	207.100.000	95 %	210.100.000	95 %	215.100.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Database anak terlantar dan kurang mampu	95 %	205.100.000	95 %	205.100.000	95 %	207.100.000	95 %	210.100.000	95 %	215.100.000	APBD	Perempuan dan Perlindungan Anak
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	-	REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran)	700 Org	158.000.000	700 Org	158.000.000	800 Org	165.000.000	850 Org	200.000.000	850 Org	200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Akseptor Kb	-	Memper mudah Pencaker Memperoleh Informasi Pekerjaan dan Bagi Pemberi Kerja Dapat Langsung Mengetahui Calon Pekerja	5 Kegiatan	200.000.000	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Membangun Ekosistem Edukasi /	Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Rasio Ideal Guru Dan Siswa	16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.	Memberikan edukasi melalui penyuluhan KB dan optimalisa	5 Kegiatan	200.000.000	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	265.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

Pendidikan	informasi dan media digital				si layanan aplikasi NEW SIGA dan ELSIMIL												
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Jumlah Ptk Dan Kualitas Ptk	-	Pemanfaatan Sumberdaya, Keahlian, Kreativitas, dan Inovasi untuk mengembangkan lingkungan belajar	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan keamanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	-	Portal Informasi Dinas Sosial	10%	350.000.000	10%	350.000.000	35%	350.000.000	50%	350.000.000	80%	350.000.000	APBD	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga /Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial(%)	-	Portal Informasi Dinas Sosial	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	APBD	Dinas Sosial

5.3.6 Peta Jalan Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Pelindungan Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem koordinasi pengawasan dan evaluasi perlindungan lingkungan Kota Palopo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditangani	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Sungai	70 Ha	312.900.000	70 Ha	312.900.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya;	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, Pembentukan Forum Ruang Terbuka Hijau	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Drainase	10 %	383.700.000	10 %	383.700.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Limbah dan Sampah	Pengembangan sistem informasi dan aksesibilitas pengelolaan sampah dan limbah Kota Palopo	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	1. Pengurangan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse, Ricycle) dari sumbernya	20 %	150.000.000	20 %	150.000.000	25 %	100.000.000	25 %	50.000.000	25 %	50.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Penataan Ruang)
Tata Kelola Energi	Optimalisasi sarana prasarana tata	Pembangunan Prasarana	Jumlah lampu jalan yang dikontrol	7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh	1. Aplikasi pengontrol	150	30.000.000	150	30.000.000	200	45.000.000	200	45.000.000	150	30.000.000	APBD	UPTD PJU

	kelola energi pada fasilitas publik	Jalan di Jalan Kota Palopo	otomatis dan dikontrol melalui smartphone	sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.	olan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) 2. Pengontrolan cahaya dan intensitas lampu jalan	unit		unit		unit		unit		unit			
--	-------------------------------------	----------------------------	---	--	---	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--

BAB VI PENUTUP

Buku sebagai acuan bagi pembangunan *Smart City* Kota Palopo dengan jangka waktu 2023 - 2032. Masterplan *Smart City* Kota Palopo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis sekaligus operasional untuk Kota Palopo yang dihasilkan dari kegiatan perumusan dan pengambilan kesepakatan oleh berbagai pihak. Berdasarkan hal tersebut maka Masterplan *Smart City* Kota Palopo yang disajikan pada buku ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi berbagai pihak seperti calon investor, pelaku bisnis, aktivis, LSM dan pihak lain untuk terlibat dalam mewujudkan pembangunan *Smart City* Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). Buku Panduan Penyusunan Masterplan

Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City. Kemenkominfo RI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021b). SNI ISO37122:2019 Indikator Untuk Kota Cerdas. Kemenkominfo RI.

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemerintah Kota palopo.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah Kota Palopo.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pemerintah Daerah Kota Palopo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Kota Palopo

Peraturan Daerah

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 247 / VI / 2022 tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 248 / VI / 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo



BUKU II
MASTERPLAN SMART CITY
KOTA PALOPO